



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029 KAB. LUWU TIMUR





BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 231 /A-08/ VII /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Juli 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 231 /A-08/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- II. Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- III. Ketua II : Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- IV. Ketua III : Asisten Administrasi Umum
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
- VI. Anggota :
 - 1. Fungsional Perencana Ahli Muda
 - 2. Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda
 - 3. Fungsional Perencana Ahli Pertama
 - 4. Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah
- VII. Kelompok Kerja
 - a. Bagian Umum
 - Ketua : Kepala Bagian Umum
 - Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - 2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
 - 3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
 - b. Bagian Organisasi
 - Ketua : Kepala Bagian Organisasi
 - Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Organisasi
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Ketua : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Protokol
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - d. Bagian Pemerintahan
 - Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan
 - Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Pemerintahan
 - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Kesejahteraan Rakyat

f. Bagian Hukum

Ketua : Kepala Bagian Hukum

Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Hukum

g. Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional Bagian
Perekonomian dan Pembangunan

h. Bagian Pengadaan Barang Jasa

Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang /Jasa
2. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian
Pengadaan Barang/Jasa



BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 231 /A-08/ VII /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- I. Ketua :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.
- II. Ketua I :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum Tahun 2025-2029.
- III. Ketua II :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025-2029.
- IV. Ketua III :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2025-2029.
- V. Sekretaris :
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.
- VI. Anggota :
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Sekretariat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

VII. Kelompok Kerja

1. Ketua :

melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja masing masing Bagian.

2. Anggota :

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja masing-masing Bagian;
- b. membantu melakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah di kelompok kerja masing-masing Bagian;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah di kelompok kerja masing-masing Bagian;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah di kelompok kerja masing-masing Bagian;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja masing masing Bagian; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Sekretariat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja masing-masing Bagian.

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029. Dengan harapan agar dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur sehingga dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029.

Akhir kata disampaikan terima kasih atas segala masukan dan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Luwu Timur serta dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dimasa yang akan datang.

Malili, September 2025

Sekretaris Daerah



Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19660620 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	7
2.1 Gambaran Permasalahan.....	7
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah....	13
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	33
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	40
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	41
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	41
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah....	41
2.2 Permasalahan dann Isu Strategi Perangkat Daerah	67
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	67
2.2.2 Isu Strategis	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH.....	69
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur	69
3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur	69
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 s.d 2029.....	73
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 s.d 2029	74
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
4.1 Program, Kegiatan, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	76
4.2 Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah.....	118

BAB V PENUTUP.....	120
5.1 Kesimpulan.....	120
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	120
5.3 Pengendalian Evaluasi.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025	19
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	20
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2025.....	20
Tabel 2.4	Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur.....	21
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2021 s.d 2024	34
Tabel 2.6	Realisasi Capaian Indikator Nilai SAKIPTahun 2021 s.d Tahun 2024 .	39
Tabel 2.7	Capaian Indikator Capaian Program Sekretariat Daerah Tahun 2021 s.d 2024	40
Tabel 2.8	Kerjasama/MOU yang difasilitasi oleh Sekretraiat Daerah Tahun 2021 s.d 2024	42
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2025 s.d 2029	70
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 s.d 2029.....	74
Tabel 3.3	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	75
Tabel 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025 s.d 2029	77
Tabel 4.2	Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan 2026 s.d 2030 Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur.....	100
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	116
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2025 s.d 2029	118
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretraiat Daerah Tahun 2025 s.d 2029	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Kelembagaan Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur	17
Gambar 2.2 Gambaran Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Kelamin	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan merupakan penjabaran dari RPJMD 2025-2029 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dan menjadi acuan dalam perencanaan tahunan. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yakni menjadikan **"LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA"**

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029 dilandasi dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Penyusunan RPJMD Tahun 2025 – 2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 – 2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2045.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan pelayanan di Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 tahun.
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Luwu Timur kedalam visi, misi, tujuan, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur

1.3.2 Tujuan

1. Menjabarkan arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025- 2029)
2. Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pada Sekretariat Daerah yang nantinya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan setiap sub kegiatan yang akan dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
3. Menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Tata cara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur disusun sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

BAB .II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Pelayanan PD, Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat daerah jika ada, Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan merumuskan Isu Strategis Daerah.

BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan Strategi serta Arah Kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan RENSTRA Perangkat Daerah.

BAB. IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan serta indikator kinerja dan target yang

ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB. V PENUTUP

Memuat tentang penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah, keterlibatan Stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PERMASALAHAN

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan revisi dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2020, Daerah dan pada tahun 2021 dilakukan perubahan kelembagaan Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Bagian Pemerintahan yang membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat yang membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional
 - c) Bagian Hukum yang membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - a) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Kelompok Jabatan Fungsional
 - b) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa
 - Kelompok Jabatan Fungsional

4. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a) Bagian Organisasi yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
 - b) Bagian Umum yang membawahi:
 - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perlengkapan dan
 - Sub Bagian Rumah Tangga
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang membawahi:
 - Sub Bagian Keprotokoleran
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - d) Bagian Perencanaan dan Keuangan yang membawahi
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, dan pelayanan administratif perangkat daerah.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah,
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah,
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum,
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas pokok Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan,
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat,
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum, dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

1. Bagian Pemerintahan

Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah,
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah,
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah,
- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah serta kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi pemerintahan,

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi kewilayahan,
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang otonomi daerah dan kerja sama, dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang bina mental spiritual,
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar,
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan,
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bagian Hukum

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis,

- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah,
- c. Membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perundang-undangan
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang bantuan hukum
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang dokumentasi dan informasi;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam :

- a. Penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan barang dan jasa; dan

- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Perekonomian, sumber daya alam dan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok Menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah,
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam,;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi pembangunan dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
 - b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

- c. Membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang rumusan teknis perencanaan,
- d. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan penyelesaian sengketa serta layanan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas pokok Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa,
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

C. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam :

- a. Penyusunan kebijakan daerah,
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, Umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi,
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum,

- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang protokol dan komunikasi pimpinan,
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

1. Bagian Organisasi

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
- c. Membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, dan reformasi birokrasi dan kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang tata laksana dan pelayanan public,
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang reformasi birokrasi dan kinerja, dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2. Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis,

- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokok Menyenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian,
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perlengkapan,
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rumah tangga dan,
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

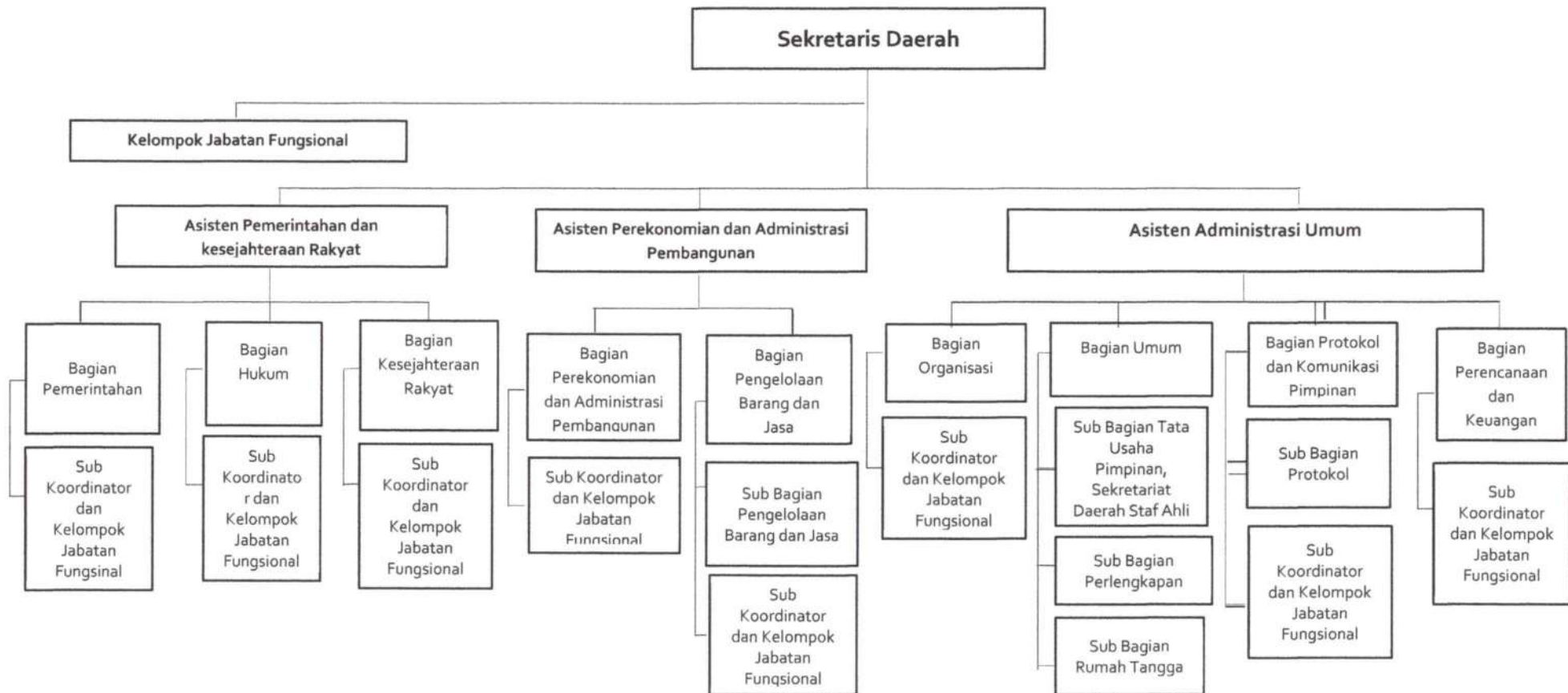
- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
- c. Membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang protocol,

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang komunikasi pimpinan,
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang dokumentasi pimpinan dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
 - b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
 - c. Membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, dan akuntansi, aset dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok Menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan anggaran
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan dan verifikasi
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang akuntansi, aset dan pelaporan,
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



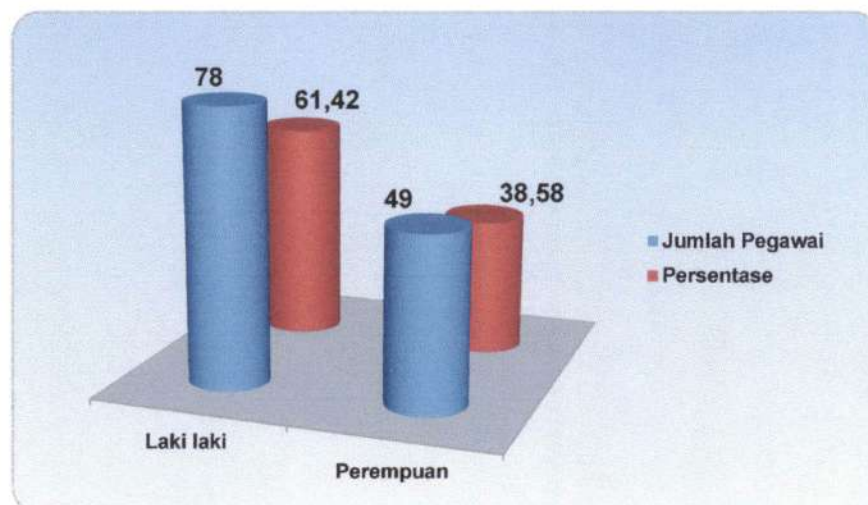
2.1.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki cukup beragam. Tahun 2025 secara Keseluruhan Jumlah Pegawai sebanyak 157 Orang, dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 127 Orang dan Upah Jasa sebanyak 56 Orang.

Sedangkan berdasarkan Jabatan ASN, SDM Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur terdiri dari 7 orang jabatan pimpinan tinggi, 9 orang jabatan pimpinan administrator, 5 orang jabatan pengawas, 33 orang fungsional dan 73 Fungsional umum /Staf. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah terdiri dari 78 orang Laki-Laki atau sebesar 61,42%, perempuan 49 orang atau sebesar 38,58%. Sebagaimana pada gambar 2.2 sebagai berikut :

Gambar 2.2
Gambaran Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber Data : Kepegawaian Setdakab. Luwu Timur Tahun 2025

Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah–langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima. Semangat kompetisi, inovatif dan menguasai ilmu pengetahuan oleh seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (*learning organization*).

Adapun jumlah sumber daya manusia saat ini pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Kepangkatan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

No.	Tingkat Kepangkatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Madya /Golongan (IV.d)	1	-	1
2	Pembina Utama Muda /Golongan (IV.c)	3	2	5
3	Pembina TK. I /Golongan (IV.b)	4	4	8
4	Pembina /Golongan (IV.a)	2	3	5
5	Penata TK. I /Golongan (III.d)	11	6	17
6	Penata /Golongan (III.c)	6	5	11
7	Penata Muda TK.I /Golongan (III.b)	9	2	11
8	Penata Muda /Golongan (III.a)	16	12	37
9	Pengatur TK.I /Golongan (II.d)	-	1	1
10	Pengatur /Golongan (II.c)	0	1	1
11	Pengatur Muda TK.I /Golongan (II.b)	1	0	1
12	Golongan IX (P3K)	9	11	20
13	Golongan VII (P3K)	-	1	1
14	Golongan V (P3K)	7	1	8
Jumlah		78	49	127

Sumber Data : Kepegawaian Setdakab. Luwu Timur Tahun 2025

b. Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Sarjana (S3)	-	-	-
2	Sarjana (S2)	10	10	20
3	Sarjana (S1)	45	39	84
4	Sarjana Muda (D3, D2, D1)	3	3	6
5	SLTA/Sederajat	8	8	16
6	SLTP/Sederajat	1	-	1
7	SD	-	-	-
Jumlah		67	60	127

Sumber Data : Kepegawaian Setdakab. Luwu Timur Tahun 2025

c. Berdasarkan Eselon

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2025

No.	Eselon/Staf	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	5	2	7
2	Eselon III	4	5	9
3	Eselon IV	3	2	5
Jumlah		12	9	21

Sumber Data : Kepegawaian Setdakab. Luwu Timur Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur yang memadai merupakan salah satu faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur. Sarana dan prasarana ini berpengaruh terhadap kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan program kerja yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan pada Sekretariat Daerah. Selain profesionalisme pegawai, dengan tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan di lapangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur akan semakin berjalan lancar, tertib, cepat dan mendukung kenyamanan dalam bekerja. Gambaran secara lengkap tentang kondisi Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2005	3	Baik
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2005	2	Baik
3	Tanah Bangunan Gudang	2005	1	Baik
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2005	7	Baik
5	Tanah Untuk Bangunan Masjid	2005	1	Baik
6	Tanah Kebun Induk	2005	9	Baik
7	Tanah Lapangan Tennis	2005	2	Baik
8	Tanah Untuk Jalan Nasional	2005	1	Baik
9	Tanah Lapangan Taman lainnya	2005	2	Baik

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
10	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2005	3	Rusak Berat
11	Sepeda Motor	2005	3	Rusak Berat
12	Sepeda Motor	2005	3	Baik
13	Reciver	2005	4	Rusak Berat
14	Scanner (Universal Tester)	2005	6	Rusak Berat
15	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2005	12	Rusak Berat
16	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	2005	1	Rusak Berat
17	Mesin Fotocopy Lainnya	2005	1	Rusak Berat
18	Lemari Besi/Metal	2005	17	Baik
19	Filing Cabinet Besi	2005	12	Rusak Berat
20	CCTV - Camera Control Television System	2005	8	Rusak Berat
21	Mesin Absensi	2005	4	Rusak Berat
22	Meja Kerja Kayu	2005	13	Baik
23	Kursi Putar	2005	18	Rusak Berat
24	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2005	2	Rusak Berat
25	Lemari Es	2005	21	Baik
26	Lemari Es	2005	16	Rusak Berat
27	A.C. Split	2005	50	Rusak Berat
28	Kipas Angin	2005	4	Rusak Berat
29	Exhaust Fan	2005	2	Rusak Berat
30	Kompas Gas (Alat Dapur)	2005	10	Rusak Berat
31	Rice Cooker (Alat Dapur)	2005	3	Rusak Berat
32	Alat Dapur lainnya	2005	46	Rusak Berat
33	Televisi	2005	33	Rusak Berat
34	Amplifier	2005	3	Rusak Berat
35	Loudspeaker	2005	4	Rusak Berat
36	Sound System	2005	6	Rusak Berat
37	Wireless	2005	5	Rusak Berat
38	Handy Cam	2005	2	Rusak Berat
39	Lampu	2005	5	Rusak Berat
40	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2005	2	Rusak Berat

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2005	16	Rusak Berat
42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2005	9	Rusak Berat
43	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2005	74	Rusak Berat
44	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	2005	1	Rusak Berat
45	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2005	1	Rusak Berat
46	Photo Tustel	2005	5	Rusak Berat
47	Telephone (PABX)	2005	3	Rusak Berat
48	Pesawat Telephone	2005	1	Rusak Berat
49	Facsimile	2005	7	Rusak Berat
50	peeralatan antena shf/ parabola lainnya (dst)	2005	1	Rusak Berat
51	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	2005	1	Rusak Berat
52	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	2005	5	Rusak Berat
53	alat laboratorium patologi lainnya (dst)	2005	5	Rusak Berat
54	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2005	8	Rusak Berat
55	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	2005	2	Rusak Berat
56	P.C Unit	2005	64	Rusak Berat
57	Lap Top	2005	30	Rusak Berat
58	Note Book	2005	34	Rusak Berat
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2005	60	Rusak Berat
60	Peralatan Komputer lainnya	2005	7	Rusak Berat
61	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2005	5	Baik
62	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2005	1	Baik
63	Gedung Pos Jaga Permanen	2005	6	Baik
64	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	2005	7	Baik
65	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	2005	12	Baik
66	Pagar Permanen	2005	5	Baik

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
67	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2006	1	Baik
68	Tanah Untuk Jalan Khusus/ Komplek	2006	1	Baik
69	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	2006	10	Rusak Berat
70	Mesin Penghitung Uang	2006	1	Rusak Berat
71	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2006	1	Rusak Berat
72	Meja 1/2 Biro	2006	2	Baik
73	A.C. Sentral	2006	4	Rusak Berat
74	Compact Disc	2006	1	Rusak Berat
75	Tustel	2006	8	Rusak Berat
76	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2006	4	Baik
77	Generator Set (Lab Scale)	2006	9	Rusak Berat
78	Generator Set (Lab Scale)	2006	1	Baik
79	Kotak Peti Lengkap	2006	2	Baik
80	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2006	1	Kurang Baik
81	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	2006	2	Baik
82	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	2006	2	Kurang Baik
83	Buku Umum Lain-lain	2006	1	Rusak Berat
84	Buku Umum Lain-lain	2006	2	Kurang Baik
85	Bak Air	2007	1	Rusak Berat
86	Lemari Kayu	2007	23	Baik
87	White Board	2007	2	Baik
88	Kursi Besi/Metal	2007	704	Rusak Berat
89	Mesin Pemotong Rumput	2007	7	Rusak Berat
90	A.C. Window	2007	29	Rusak Berat
91	Tiang Bendera	2007	1	Rusak Berat
92	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2007	2	Baik
93	Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2007	1	Rusak Berat
94	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2007	2	Rusak Berat

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	2007	1	Baik
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2007	17	Baik
97	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2007	29	Baik
98	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2007	2	Baik
99	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2007	3	Rusak Berat
100	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	2007	7	Baik
101	Buffet Kayu	2007	2	Baik
102	Buffet Kaca	2007	1	Baik
103	alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	2007	2	Rusak Berat
104	Alat Kesehatan olahraga lainnya	2007	1	Rusak Berat
105	TV Monitor	2007	4	Rusak Berat
106	Distiling Apparatus	2007	1	Rusak Berat
107	Peralatan Personal Komputer lainnya	2007	1	Rusak Berat
108	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2007	3	Baik
109	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	2007	1	Baik
110	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	2007	1	Baik
111	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	2007	9	Kurang Baik
112	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	2008	2	Baik
113	Lemari Penyimpan	2008	6	Rusak Berat
114	Alat Pencetak Label	2008	1	Rusak Berat
115	Kursi Tamu	2008	4	Rusak Berat
116	Mesin Cuci	2008	9	Rusak Berat
117	Lensa Kamera	2008	6	Rusak Berat
118	Layar Film/Projector	2008	7	Rusak Berat

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
119	Digital Handycam VHSC	2008	6	Rusak Berat
120	Hard Disk	2008	21	Rusak Berat
121	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2008	1	Baik
122	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	2008	2	Baik
123	Tanah Kaveling (dst)	2009	2	Baik
124	mesin ketik lainnya (dst)	2009	4	Rusak Berat
125	Meja 1/2 Biro	2009	14	Rusak Berat
126	Microphone	2009	3	Rusak Berat
127	Telecine	2009	2	Rusak Berat
128	Handy Talky (HT)	2009	20	Rusak Berat
129	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	2009	1	Rusak Berat
130	Portable Noise Monitoring	2009	1	Rusak Berat
131	Speaker Komputer	2009	2	Rusak Berat
132	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2009	7	Baik
133	Jeep	2010	1	Rusak Berat
134	Station Wagon	2010	2	Rusak Berat
135	Filing Cabinet Besi	2010	20	Baik
136	A.C. Window	2010	30	Baik
137	ALat Peraga PMP Lain-lain Dst.	2010	1	Rusak Berat
138	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	2010	11	Kurang Baik
139	pembangkit uap air panas/ steam generator lainnya (dst)	2011	2	Rusak Berat
140	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2011	17	Baik
141	Rak Besi	2011	2	Rusak Berat
142	Kursi Rapat	2011	916	Baik
143	Kursi Rapat	2011	56	Rusak Berat
144	A.C. Split	2011	121	Baik
145	Tabung Gas	2011	7	Baik
146	Televisi	2011	64	Baik
147	Mic Conference	2011	1	Baik

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
148	Alat Hiasan	2011	114	Baik
149	Alat Hiasan	2011	10	Rusak Berat
150	Lampu	2011	21	Baik
151	Lighting Stand Tripod	2011	2	Rusak Berat
152	Lighting Stand Tripod	2011	3	Baik
153	Nebulizer Perimeter (Anestesi)	2011	1	Rusak Berat
154	Spirometer (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	2011	2	Rusak Berat
155	Stabilizer	2011	4	Rusak Berat
156	Screen Pembaras	2011	1	Rusak Berat
157	Safety Can	2011	213	Baik
158	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	2011	5	Rusak Berat
159	Keyboard (Peralatan Mainframe)	2011	1	Rusak Berat
160	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	54	Baik
161	External	2011	1	Rusak Berat
162	Server	2011	3	Rusak Berat
163	Router	2011	1	Rusak Berat
164	Wireless Access Point	2011	10	Rusak Berat
165	Lukisan lain-lain	2011	6	Baik
166	Barang Kerajinan Lain-lain	2011	115	Baik
167	Global Positioning System	2012	1	Rusak Berat
168	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2012	1	Rusak Berat
169	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2012	5	Baik
170	Lambang Garuda Pancasila	2012	1	Baik
171	Tangga Aluminium	2012	3	Rusak Berat
172	Alat Pemadam/Portable	2012	4	Baik
173	Mesin Film Color Analyzer	2012	1	Rusak Berat
174	Genset	2012	3	Baik
175	Modem	2012	3	Rusak Berat
176	Peralatan Jaringan lainnya	2012	19	Rusak Berat
177	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	2012	1	Baik

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
178	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	2012	2	Baik
179	Mesin Ketik Listrik	2013	5	Rusak Berat
180	Alat Kantor Lainnya	2013	2	Baik
181	Professional Sound System	2013	1	Rusak Berat
182	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2013	1	Rusak Berat
183	P.C Unit	2013	24	Baik
184	Note Book	2013	30	Baik
185	Hard Copy Console	2013	1	Baik
186	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2013	1	Rusak Berat
187	Tenda	2013	36	Rusak Berat
188	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	2013	2	Baik
189	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2014	1	Baik
190	Meja Rapat	2014	4	Baik
191	Meja Podium	2014	1	Rusak Berat
192	Kursi Tamu	2014	41	Baik
193	Kursi Putar	2014	55	Baik
194	Sofa	2014	26	Baik
195	Alat Dapur lainnya	2014	14	Baik
196	Amplifier	2014	2	Baik
197	Sound System	2014	5	Baik
198	Camera Video	2014	1	Rusak Berat
199	Meja Tamu Biasa	2014	6	Rusak Berat
200	Camero Photo Micrograph	2014	2	Rusak Berat
201	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2014	2	Baik
202	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2014	1	Baik
203	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2014	2	Baik
204	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	2014	1	Baik
205	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	2014	3	Baik

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
206	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	2015	3	Rusak Berat
207	Lemari Kaca	2015	5	Baik
208	A.C. Sentral	2015	6	Baik
209	Tiang Bendera	2015	11	Baik
210	Gordyin/Kray	2015	15	Baik
211	Camera Film	2015	2	Rusak Berat
212	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2015	1	Rusak Berat
213	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2015	5	Kurang Baik
214	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten	2015	2	Baik
215	Jaringan Distribusi Lain-lain	2015	3	Baik
216	Station Wagon	2016	19	Baik
217	Bangku Tunggu	2016	1	Rusak Berat
218	Bangku Tunggu	2016	4	Baik
219	Meubeler lainnya	2016	44	Baik
220	Mesin Cuci	2016	6	Baik
221	Kipas Angin	2016	5	Baik
222	Reach In Frezzer	2016	2	Baik
223	Radio	2016	1	Rusak Berat
224	Equalizer	2016	1	Rusak Berat
225	Microphone	2016	11	Baik
226	Cable	2016	1	Baik
227	Camera Electronic	2016	1	Rusak Berat
228	Lensa Kamera	2016	4	Baik
229	Mixer PVC	2016	1	Rusak Berat
230	Wireless Amplifier	2016	3	Baik
231	Portable Noise Monitoring	2016	2	Baik
232	Komputer Jaringan lainnya	2016	4	Rusak Berat
233	Server	2016	1	Baik
234	Dump Truck	2017	1	Baik
235	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	2017	2	Baik
236	Brandkas	2017	1	Baik

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
237	Papan Pengumuman	2017	4	Baik
238	Meja Bundar	2017	4	Baik
239	Kasur/Spring Bed	2017	56	Baik
240	Kasur/Spring Bed	2017	6	Baik
241	Meja Makan Besi	2017	7	Baik
242	Sofa	2017	2	Rusak Berat
243	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2017	7	Baik
244	Wireless	2017	3	Baik
245	Unit Power Supply	2017	1	Rusak Berat
246	Camera Video	2017	10	Baik
247	Karpet	2017	37	Baik
248	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	12	Baik
249	Stabilizer	2017	1	Baik
250	Lap Top	2017	65	Baik
251	Hard Disk	2017	4	Baik
252	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2017	2	Baik
253	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	2017	3	Baik
254	Kasur/Spring Bed	2018	6	Rusak Berat
255	Kasur/Spring Bed	2018	4	Baik
256	Alat Pemanas Ruangan	2018	3	Baik
257	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2018	1	Rusak Berat
258	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2018	4	Baik
259	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2018	1	Rusak Berat
260	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2018	14	Baik
261	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2018	27	Baik
262	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2018	3	Baik
263	Tugu Peringatan Lainnya	2018	1	Baik
264	Scanner (Universal Tester)	2019	1	Baik
265	Meja Panjang	2019	4	Baik
266	Kasur/Spring Bed	2019	5	Baik
267	Rak Sepatu (Almunium)	2019	1	Baik
268	Mesin Pemotong Rumput	2019	6	Baik

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
269	Kompor Gas (Alat Dapur)	2019	9	Baik
270	Rice Cooker (Alat Dapur)	2019	2	Baik
271	Kitchen Set	2019	2	Baik
272	Meja Kerja Pejabat Eselon I/ Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota	2019	1	Baik
273	Kursi Kerja Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota	2019	1	Baik
274	Camera View Finder	2019	1	Rusak Berat
275	Layar Film/ Projector	2019	5	Baik
276	alat laboratorium patologi lainnya (dst)	2019	1	Baik
277	Kompor Listrik (General Laboratory Tool)	2019	1	Baik
278	Jalan Khusus Lainnya	2019	1	Baik
279	Jaringan Transmisi Lain-lain	2019	1	Baik
280	Camera film	2020	1	Baik
281	Router	2020	2	Baik
282	Lemari Penyimpan	2021	2	Baik
283	CCTV - Camera Control Television System	2021	3	Baik
284	LCD Projector/ Infocus	2021	5	Baik
285	Kasur/ Spring Bed	2021	7	Baik
286	Mimbar/ Podium	2021	4	Baik
287	Meja Rapat Pejabat lainnya	2021	1	Baik
288	Microphone/ Wireless MIC	2021	1	Baik
289	Tripod Camera	2021	2	Baik
290	Video Conference	2021	1	Baik
291	External/ Portable Hardisk	2021	2	Baik
292	Peralatan Komputer lainnya	2021	2	Baik
293	Air Conditioning (AC)	2021	5	Baik
294	Rak Besi	2022	1	Baik
295	Lemari Kaca	2022	1	Kurang Baik
296	Lampu-lampu Kristal	2022	1	Baik
297	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2022	1	Baik
298	Meja Resepsionis	2022	2	Baik

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
299	Kasur/Spring Bed	2022	8	Baik
300	Dispenser	2022	19	Baik
301	Tangga	2022	1	Baik
302	Meja Tamu Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2022	7	Baik
303	Scanner (Assembly/counting System)	2022	2	Baik
304	Matras	2022	5	Baik
305	Papan Nama Instansi	2023	1	Baik
306	Meja Tambahan	2023	9	Baik
307	Kasur/Spring Bed	2023	20	Baik
308	Meja Makan Kayu	2023	3	Baik
309	Kursi Biasa	2023	10	Baik
310	Nakas	2023	17	Baik
311	Tangga Aluminium	2023	3	Baik
312	Tangki Air	2023	3	Baik
313	Meja Tamu Biasa	2023	7	Baik
314	Kursi Rapat Pejabat lainnya	2023	30	Baik
315	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2023	1	Baik
316	Video Monitor	2023	1	Baik
317	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	2023	2	Baik
318	Network Monitoring System	2023	1	Baik
319	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2023	1	Baik
320	Rak Server	2023	1	Baik
321	Switch Rak	2023	3	Baik
322	Closed Circuit Television (CCTV)	2023	3	Baik
323	Fire Alarm System	2023	3	Baik
324	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2023	1	Baik
325	Taman lainnya	2023	2	Baik
326	Kasur/Spring Bed	2024	6	Baik
327	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2024	1	Baik
328	Mesin Setrika Kulit	2005	1	Rusak Berat
329	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2005	1	Baik
330	Kursi Besi/Metal	2011	20	Baik

No.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
331	Peralatan Jaringan lainnya	2012	35	Baik
332	Pompa Air	2021	1	Baik

Sumber Data : KIB Sekretariat Daerah Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021, Sekretariat Daerah melaksanakan tugas pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambaran pelaksanaan tugas sekretariat Daerah dijabarkan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Periode Tahun 2021-2026.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan selama 5 (lima) tahun Sekretariat Daerah telah melaksanakan beberapa program yaitu :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Program Perekonomian dan Pembangunan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kab/Kota.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel TC. 23 sebagai berikut :

Tabel 2.5 (Tabel TC-23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2021 - 2024
Kabupaten Luwu Timur

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP SETDA					64,25	66,84	68,22	70,85	64,25	70,18	74,40	58,30	100,00	104,99	109,05	82,22
Persentase rata-rata capaian kinerja program Sekretariat Daerah					86,67	93,33	95,00	96,67	86,67	78,55	103,09	98,21	100,00	84,16	108,51	101,59
Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi					100	100	100	100	100	98,17	96,63	94,63	100	98,17	96,63	94,63
Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik					100	100	100	100	100	84,84	97,77	96,09	100	84,84	97,77	96,09
Persentase laporan BMD Pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100	100	100	100	95,00	92,85	98,01	109	95,00	92,85	98,01	109
Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD					100	100	100	100	100	95,19	95,17	98,38	100	95,19	95,17	98,38
Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan					100	100	100	100	100,00	92,19	55,18	66,70	100	92,19	55,18	66,7
Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah					100	100	100	100	100	132,27	106,78	100	100	132,27	106,78	100
Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik					100	100	100	100	90,15	91,09	80,00	82,35	90,15	91,09	80	82,35

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Laopran Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					100	100	100	100	80,00	54,17	82,09	75,00	80	54,17	82,09	75
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Rujab dan Mess					100	100	100	100	75	70,24	86,11	100	75	70,24	86,11	100
Penguatan tata Kelola								65,05				66,54				102,291
Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Terpenuhi					100	100	100	100	100	100	92,81	100	100	100	92,81	100
Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan (%)					80	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan					4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan					4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100
Persentase koordinasi hukum yang dilaksanakan					85	85	100	100	85	97,96	100	116	100	115,25	100	116
Jumlah kerjasama yang dihasilkan					n.a-	30	30	20	n.a	44	58	26	n.a	146,67	193,33	130
Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan					80	50	85	90	80	37,5	109,29	100	100	75	121,55	111,11
Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan					12	12	12	4	12	11	11	4	100	91,667	91,667	100
Jumlah rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan					8	8	8	4	6	8	7	4	75	100	87,5	100
Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan					80	80	100	100	90	111,49	100	100,67	112,5	139,36	100	100,67

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan					8	8	8	4	8	2	8	4	100	25	100	100

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran “*Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah*” yang diukur oleh 2 (dua) Indikator yaitu “*Nilai SAKIP Sekretariat Daerah*” dan “*Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah*”. Capaian Kinerja Indikator yang pertama disajikan sebagai berikut :

1. *Indikator Kinerja yang pertama yaitu Nilai Sakip Sekretariat Daerah*

Realisasi capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun Tahun 2021 s/d Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Capaian Indikator Tahun 2021 s/d Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi kinerja			
			2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	64,25	70,18	74,40	58,30

Sumber Data : Bagian Perencanaan Sekda Tahun 2025

Capaian Indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dimana melebihi target Renstra namun pada Tahun 2024 nilai SAKIP Setda berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat mengalami penurunan dengan nilai 58,30, hal ini disebabkan karena adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dari berbasis program kegiatan menjadi berbasis SMART yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki dokumen perencanaan sementara waktu evaluasi dari Kementerian PAN-RB yang tidak mencukupi untuk melakukan perbaikan.

2. Indikator yang kedua yaitu: *Persentase Rata-Rata Capaian Program Sekretariat Daerah*

Realisasi Capaian Indikator Persentase rata-rata capaian kinerja program Sekretariat Daerah Tahun 2021 s/d 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Capaian indikator Tahun 2021 s/d Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi indikator kinerja			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah	%	86,67	78,55	103,09	98,21

Sumber Data : *Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran yang kedua ini mengalami peningkatan dan Penurunan karena di sebabkan oleh beberapa target kinerja pada beberapa program tidak memenuhi target.

Indikator Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah didukung oleh 3 (tiga) Program sebagai berikut :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, dengan Indikator Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai Standar yang didukung oleh 21 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Empat bagian yakni **Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Prokopim** dengan capaian program dari Tahun 2021 s.d Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja				Realisasi indikator kinerja				Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	86,67	93,33	95	96,67	86,67	78,56	99,98	94,63	

Pada Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 mengalami penurunan realisasi kinerja salah satunya disebabkan oleh adanya kekosongan jabatan wakil bupati sampai akhir tahun sehingga capaian kinerja pada kegiatan tidak maksimal sedangkan penurunan realisasi kinerja pada tahun 2024 disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sehingga ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang ditunda.

2. **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**, dengan Indikator *Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan*, Realisasi indikator kinerja didukung oleh empat kegiatan dan 11 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bagian yakni **Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum**. Realisasi Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja				Realisasi indikator kinerja				Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	%	80	100	100	100	80	100	100	100	

3. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan Indikator Persentase Rekomendasi Sektor Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Program ini didukung oleh 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 Bagian yakni **Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2021 s.d tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja				Realisasi indikator kinerja				Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Rekomendasi Sektor Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	%	80	50	85	90	80	37,50	109,29	100	

Pada Indikator Program Perekonomian dan Pembangunan Pada Tahun 2022 realisasi indikator kinerja tidak mencapai target disebabkan oleh kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam yang tidak mencapai target karena kegiatan ini masih berfokus pada pengumpulan data terkait kebijakan sumber daya alam.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah (PD). Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak roda pemerintahan, penghubung antar lembaga, dan penyedia layanan pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan daerah Pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah mencakup antara lain :

- ❖ Pelayanan administrasi pemerintahan, termasuk penyiapan rapat pimpinan, penyusunan kebijakan daerah, dan fasilitasi komunikasi pimpinan.
- ❖ Pelayanan koordinasi kebijakan, untuk menjamin sinergi antar PD serta antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
- ❖ Pelayanan dukungan teknis dan administratif bagi seluruh perangkat daerah dalam bidang hukum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, dan keuangan.
- ❖ Pelayanan keprotokolan, dan pendokumentasian informasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan citra pemerintah daerah.
- ❖ Fasilitasi pengembangan kebijakan strategis daerah serta pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Dalam menjalankan fungsi dan layanannya, Sekretariat Daerah memiliki beberapa kelompok sasaran utama, antara lain:

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai penerima layanan utama dalam bentuk dukungan kebijakan, asistensi teknis, dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan.
- Perangkat Daerah (PD) Sebagai mitra kerja dalam koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah, serta pengguna layanan administratif dan teknis dari Setda.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mendapatkan dukungan dalam penyusunan kebijakan daerah, penyampaian dokumen perencanaan, serta pelaporan pertanggungjawaban pemerintah.
- Instansi Vertikal dan Lembaga Lain Terlibat dalam koordinasi lintas sektoral untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program-program daerah.
- Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Sebagai penerima layanan kepegawaian, pengembangan kapasitas, serta informasi dan kebijakan internal.
- Masyarakat dan Pemangku Kepentingan (stakeholder) menerima manfaat tidak langsung dari keberhasilan koordinasi kebijakan, keterbukaan informasi publik, dan efektivitas pemerintahan daerah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Mitra Sekretariat Daerah dalam pemberian pelayanan yaitu:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB);
2. Kementerian Hukum RI ;
3. Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
6. BUMD dan BLUD;
7. Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Perangkat Daerah (PD).

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan entitas usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dibentuk untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah. Dalam konteks pelayanan Sekretariat Daerah, BUMD berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah secara tidak langsung.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah yaitu melakukan fasilitasi perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Luwu Timur. berikut Kerjasama/MOU yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Tahun 2021 s.d Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Kerjasama Daerah/MOU yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Tahun 2021 s/d 2024

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
1	PEMDA LUWU TIMUR	Disdukcapil Dan Dinkes	25-Jan-21	147.543/01/I/PKS/PEM-LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (Nik) Dan Data Kependudukan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur
2	DISDUKCAPIL	Disdukcapil	15-Feb-21	147.542/02/II/MOU/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Pelayanan 3 In 1 (Akta Perceraian, Kk, Dan Ktp Elektronik) Di Kabupaten Luwu Timur
3	DISDUKCAPIL	Disdukcapil	15-Feb-21	147.543/03/II/PKS/PEM-LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan 3 In 1 (Akta Perceraian, Kk, Dan Ktp Elektronik) Di Kabupaten Luwu Timur
4	PEMDA LUWU TIMUR	Bpjs Ketenagakerjaan	1-Mar-21	147.542/04/III/MOU/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Upah Lingkup Pemda Luwu Timur, Guru Tenaga Upah Jasa & Tenaga Upah Jasa Dan Tenaga Upah Jasa Petugas Keagamaan Kab. Luwu Timur
5	PEMDA LUWU TIMUR	Bpjs Ketenagakerjaan	1-Mar-21	147.543/05/III/PKS/PEM-LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan Bagi Petugas Keagamaan Kabupaten Luwu Timur
6	PEMDA LUWU TIMUR	Bpjs Ketenagakerjaan	1-Mar-21	147.543/06/III/PKS/PEM-LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Upah Jasa Kabupaten Luwu Timur
7	PEMDA LUWU TIMUR	Bpjs Ketenagakerjaan	1-Mar-21	147.543/07/III/PKS/PEM-LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Dan Ketenagakerjaan Bagi Guru Upah Jasa Kabupaten Luwu Timur
8	PEMDA LUWU TIMUR	Dengan Universitas Krsiten Indonesia Toraja	23-Apr-21	147.542/08/IV/MOU/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Dibidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
9	PEMDA LUWU TIMUR	Konsultan Hukum Agus Melas, Sh,Mh & Rekan	13-Apr-21	147.543/09/IV/PKS/PEM-LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Jasa Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
10	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Bank Sulselbar Luwu Timur	3-May-21	147.542/10/V/MOU/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Program Corporat Social Responsibility (Csr) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik
11	PEMDA LUWU TIMUR	PT. Perkebunan Nusantara Xiv	3-May-21	147.542/11/V/MOU/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Program Corporat Social Responsibility (Csr) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik
12	PEMDA LUWU TIMUR	PT.Vale Indonesia Tbk	3-May-21	147.542/12/V/MOU/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Program Corporat Social Responsibility (Csr) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik
13	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kota Serang	27-May-21	147.543/14/V/KB/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Luwu Timur
14	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kota Serang	27-May-21	147.543/15/V/PKS/PEM-LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Dan Penempatan Serta Pengembangan Satuan Permukiman Mahalona Sk Pe.1 Koromalai Di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
15	PEMDA LUWU TIMUR	Komisi Pemilihan Umum (Kpu)	8-Jun-21	147.543/17/VI/MOU/PEM- LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Pembentukan Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan (Dp3)
16	PEMDA LUWU TIMUR	Universitas Muhammadiyah Palopo	11-Jul-21	147.543/18/VI/MOU/PEM- LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia
17	PEMDA LUWU TIMUR	Ats Sorowako	24-Jun-21	147.543/19/VI/MOU/PEM- LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Dibidang Pendidikan Dan Pelatihan

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
18	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kab. Ngawi	17-Jul-21	147.543/20/VII/MOU/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Luwu Timur
19	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kab. Ngawi	17-Jul-21	147.543/21/VII/PKS/PEM-LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Perpindahan Dan Penempatan Serta Pengembangan Satuan Permukiman Mahalona Skpe.1 Koromalai Di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kec. Towuti Kabupaten Luwu Timur
20	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kab.Magetan Provinsi Jawa Timur	17-Jul-21	147.543/22/VII/MOU/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Luwu Timur
21	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kab.Magetan Provinsi Jawa Timur	17-Jul-21	147.543/23/VII/PKS/PEM-LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Perpindahan Dan Penempatan Serta Pengembangan Satuan Permukiman Mahalona Skpe.1 Koromalai Di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kec. Towuti Kabupaten Luwu Timur
22	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kab.Kulon Progo	17-Jul-21	147.543/24/VII/MOU/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Luwu Timur
23	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kab.Kulon Progo	17-Jul-21	147.543/25/VII/PKS/PEM-LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Perpindahan Dan Penempatan Serta Pengembangan Satuan Permukiman Mahalona Skpe.1 Koromalai Di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kec. Towuti Kabupaten Luwu Timur
24	PEMDA LUWU TIMUR	ATS Sorowako	22-Jul-21	147.543/27/VII/MOU/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Pendidikan Dan Pelatihan
25	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kab.Bantul Provinsi Diy.Yogyakarta	22-Jul-21	147.543/28/VII/KSB/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Luwu Timur

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
26	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kab.Bantul Provinsi Diy.Yogyakarta	22-Jul-21	147.543/29/VII/PKS/PEM- LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Perpindahan Dan Penempatan Serta Pengembangan Satuan Permukiman Mahalona Skpe.1 Koromalai Di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kec. Towuti Kabupaten Luwu Timur
27	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Sleman	22-Jul-21	147.543/30/VII/KSB/PEM- LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Luwu Timur
28	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Sleman	22-Jul-21	147.543/31/VII/PKS/PEM- LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Perpindahan Dan Penempatan Serta Pengembangan Satuan Permukiman Mahalona Skpe.1 Koromalai Di Kawasan Transmigrasi Mahalona Desa Mahalona Kec. Towuti Kabupaten Luwu Timur
29	PEMDA LUWU TIMUR	Universitas Andi Djemma Palopo	5-Jul-21	147.543/32/VII/KSB/PEM- LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia
30	PEMDA LUWU TIMUR	Universitas Hasanuddin	21-Jul-21	147.543/33/VII/PKS/PEM- LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Penelitian Dan Pengembangan Parawisata Di Kabupaten Luwu Timur 2021
31	PEMDA LUWU TIMUR	PT Aneka Gas Industri	28-Jul-21	147.543/34/VII/KSB/PEM- LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Program Corporat Social Responsibility (Csr) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik
32	PEMDA LUWU TIMUR	PT.CLM	28-Jul-21	147.543/35/VII/KSB/PEM- LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Program Corporat Social Responsibility (Csr) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik
33	PEMDA LUWU TIMUR	PT Bulog Cabang Palopo	28-Jul-21	147.543/36/VII/KSB/PEM- LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Penyerapan Gabah/Beras Petani Kab Luwu Timur Dan Pembelian Beras Oleh Pegawai Negeri Sipil (Pns) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
34	PEMDA LUWU TIMUR	Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian	22-Jul-21	147.543/37/VII/KSB/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Inovasi Teknologi
35	PEMDA LUWU TIMUR	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan	28-Jul-21	147.543/38/VII/PKS/PEM-LT/2021	Perjanjian Kerjasama (Pks) Antara Pemda Luwu Timur Dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
36	PEMDA LUWU TIMUR	Dirjen Paud Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi	27-Aug-21	147.543/39/VIII/NK/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak
37	PEMDA LUWU TIMUR	Dirjen Paud Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi	27-Aug-21	147.543/40/VIII/PKS/PEM-LT/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak
38	PEMDA LUWU TIMUR	STIA - LAN Makassar	10-Sep-21	147.543/42/IX/KSB/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Aparatur Dan Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur
39	PEMDA LUWU TIMUR	Konsul Kedokteran Indonesia	12-Sep-21	147.543/43/IX/NK/PEM-LT/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi Serta Data Surat Izin Praktik Dokter Dan Dokter Gigi Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Kabupaten Luwu Timur
40	PEMDA LUWU TIMUR	Konsul Kedokteran Indonesia	12-Sep-21	147.543/44/IX/RK/PEM-LT/2021	Lampiran Nota Kesepakatan Antara Konsul Kedokteran Indonesia Dengan Pemda Luwu Timur Tentang Rencana Kerja Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi Serta Data Surat Izin Praktik Dokter Dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Luwu Timur
41	PEMDA LUWU TIMUR	Dandim 1403 Sawerigading Dan Polres Luwu Timur	16-Sep-21	147.543/45/IX/NK/PEM-LT/2021	Nota Kesepakatan Tentang Sinergitas Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Luwu Timur

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
42	PEMDA LUWU TIMUR	Kajari Luwu Timur	23-Sep-21	147.543/46/IX/NK/PEM-LT/2021	Nota Kesepakatan Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
43	PEMDA LUWU TIMUR	Bpjs Ketenagakerjaan	27-Sep-21	147.543/48/PKS/PEM-LT/IX/2021	Perjanjian Kerjasama Dengan Bpjs Ketenagakerjaan, Melalui Dpmtsp Luwu Timur Tentang Pelaksanaan Kewajiban Kebersertaan Program Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Pembentukan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
44	PEMDA LUWU TIMUR	Save The Children	3-Nov-21	147.543/52/KSB/PEM-LT/X/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Sistem Perlindungan Anak Terpadu
45	PEMDA LUWU TIMUR	PT Alfamart (PT Sumber Alfaria Triwijaya)	10-Nov-21	147.543/53/KSB/PEM-LT/XI/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Pemasaran Produk Umkm
46	PEMDA LUWU TIMUR	PT Alfamart (PT Sumber Alfaria Triwijaya)	10-Nov-21	147.543/54/PKS/PEM-LT/XI/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Kabupaten Luwu Timur Di Kabupaten Luwu Timur
47	PEMDA LUWU TIMUR	PT Midi Utama Indonesia	10-Nov-21	147.543/55/KSB/PEM-LT/XI/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Pemasaran Produk Umkm
48	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Midi Utama Indonesia	10-Nov-21	147.543/56/PKS/PEM-LT/XI/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Kabupaten Luwu Timur Di Kabupaten Luwu Timur
49	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Indomarco Pristama	10-Nov-21	147.543/57/KSB/PEM-LT/XI/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Pemasaran Produk Umkm
50	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Indomarco Pristama	10-Nov-21	147.543/58/PKS/PEM-LT/XI/2021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Kabupaten Luwu Timur Di Kabupaten Luwu Timur

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
51	PEMDA LUWU TIMUR	Bpjs Kesehatan	24-Nov-21	147.543/59/NK/PEM-LT/XI/2021	Nota Kesepakatan Bersama Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
52	PEMDA LUWU TIMUR	Bpjs Kesehatan Cabang Palopo	24-Nov-21	147.543/60/ADD-PKS/PEM-LT/XI/2021	Addendum Perjanjian Kerjasama Tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Luwu Timur Dalam Rangka Universal Health Coverage
53	PEMDA LUWU TIMUR	Universitas Pancasakti Makassar	9-Dec-21	147.543/65/KSB/PEM-LT/XII/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
54	PEMDA LUWU TIMUR	Perum Bulog Cabang Palopo	9-Dec-21	147.543/66/KSB/PEM-LT/XII/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Penyerapan Gabah/Beras Petani Kab Luwu Timur Dan Pembelian Beras Oleh Pegawai Negeri Sipil (Pns) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
55	PEMDA LUWU TIMUR	PT PLN Up3 Palopo	16-Dec-21	147.543/67/KSB/PEM-LT/XII/2021	Kesepakatan Bersama Tentang Penyediaan Sambungan Listrik 500 Va Untuk Pemberian Subsidi Bagi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Luwu Timur
56	PEMDA LUWU TIMUR	Koperasi Sehati Luwu Timur	20-Dec-21	147.543/69/ADD-PKS/PEM-LT/XII/2021	Addendum Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Pns Kabupaten Luwu Timur
57	PEMDA LUWU TIMUR	BPN LUWU TIMUR	3-Jan-22	147.543/01/KSB/PEM-LT/I/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Pertanahan Dan Perintegrasia Data Pertanahan Denagn Pajak Bumi Dan Bangunan, Perkotaan Dan Perdesaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Penyelesaian Aset Pemda Luwu Timur
58	PEMDA LUWU TIMUR	P2KP UNHAS	3-Jan-22	147.543/02/PKS/PEM-LT/I/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Survey Eksternal, Kualitas Pelayanan Publik
59	PEMDA LUWU TIMUR	Agus Melas Dan Partner	6-Jan-22	147.543/04/PKS/PEM-LT/I/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Konsultasn Hkum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
60	PEMDA LUWU TIMUR	Save The Cildren	7-Jan-22	147.543/05/PKS/PEM-LT/I/2022	Program Pelindungan Anak Terpadu Di Kabupaten Luwu Timur

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
61	BKPSDM	Bpjs Ketenagakerjaan	8-Jan-22	147.543/09/PKS/PEM-LT/IV/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Upah Jasa Di Lingkup Pemerintah Daerah Kab Luwu Timur
62	PEMDA LUWU TIMUR	Mahkamah Konstitusi	25-Feb-22	147.543/07/NK/PEM-LT/II/2022	Nota Kesepakatan Bersama Tentang Peningkatan Pemahaman Pancasila Dan Hak Konstitusional Warga Negara Di Kab Luwu Timur
63	PEMDA LUWU TIMUR	Kab Bantul Provinsi Istimewa Yogyakarta	4-Mar-22	147.543/08/PKS/PEM-LT/III/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyusunan Rencana Dan Peta Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Luwu Timur
64	DINAS KOMINFO	Pemda Luwu Timur	22-Mar-22	147.543/10/PKS/PEM-LT/III/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyusunan Rencana Dan Peta Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Luwu Timur
65	PEMDA LUWU TIMUR	Kota Yogyakarta	19-Apr-22	147.543/13/KSB/PEM-LT/IV/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kab Luwu Timur
66	PEMDA LUWU TIMUR	Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo	20-Apr-22	147.543/11/KSB/PEM-LT/IV/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Trdiarma Perguruan Tinggi
67	PEMDA LUWU TIMUR	Intitut Kesehatan Dan Bisnis Kurnia Persada Palopo	20-Apr-22	147.543/12/KSB/PEM-LT/IV/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Trdiarma Perguruan Tinggi
68	PEMDA LUWU TIMUR	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	20-Apr-22	147.543/18/KSB/PEM-LT/V/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kab Luwu Timur Tahun 2022
69	PEMDA LUWU TIMUR	Kab Rembang Provinsi Jawa Tengah	20-Apr-22	147.543/12.2/KSB/PEM-LT/IV/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kab Luwu Timur Tahun 2022
70	PEMDA LUWU TIMUR	Kab Sragen Provinsi Jawa Tengah	20-Apr-22	147.543/12.1/KSB/PEM-LT/IV/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kab Luwu Timur Tahun 2022
71	PEMDA LUWU TIMUR	Kab Kebumen Provinsi Jawa Tengah	20-Apr-22	147.543/12.3/KSB/PEM-LT/IV/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kab Luwu Timur Tahun 2022

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
72	PEMDA LUWU TIMUR	Kota Serang, Prov Banteng	25-Apr-22	147.543/14/PKS/PEM-LT/IV/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Dan Pemanfaatan Pengembangan Satuan Permukiman Mahalona
73	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Vale Indonesia, Tbk	12-May-22	147.543/15/PKS/PEM-LT/V/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Pembangunan Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Bundaran Batara Guru
74	PEMDA LUWU TIMUR	Balai Latihan Kerja Makassar	17-May-22	147.543/08.1/KSB/PEM-LT/III/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi Dan Sertifikasi
75	DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR	Balai Latihan Kerja Makassar	17-May-22	147.543/08.2/KSB/PEM-LT/III/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Dan Sertifikasi, Pemanfaat Fasilitas Latihan Kerja, Dan Pembiayaan Konsumsi Peserta Pelatihan
76	PEMDA LUWU TIMUR	Kab Trangalek Provinsi Jawa Timur	20-May-22	147.543/19/KSB/PEM-LT/V/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kab Luwu Timur Tahun 2022
77	PEMDA LUWU TIMUR	Kab Sleman Provinsi Istimewa Yogyakarta	25-May-22	147.543/29/PKS/PEM-LT/V/2022	Perjanjian Kerjasama (Pks) Penyelenggaraan Transmigrasi Disatuan Permukiman Mahalona Skp C Sp.1 Kawasan Transmigrasi Di Mahalona, Kecamatan Towuti, Kab Luwu Timur, Prov. Sulsel
78	PEMDA LUWU TIMUR	Kab Bantul Provinsi Istimewa Yogyakarta	25-May-22	147.543/24/KSB/PEM-LT/V/2022	Perjanjian Kerjasama (Pks) Penyelenggaraan Transmigrasi Disatuan Permukiman Mahalona Skp C Sp.1 Kawasan Transmigrasi Di Mahalona, Kecamatan Towuti, Kab Luwu Timur, Prov. Sulsel
79	PEMDA LUWU TIMUR	Kab Kulon Progo Provinsi Istimewa Yogyakarta	25-May-22	147.543/26/KSB/PEM-LT/V/2022	Perjanjian Kerjasama (Pks) Penyelenggaraan Transmigrasi Disatuan Permukiman Mahalona Skp C Sp.1 Kawasan Transmigrasi Di Mahalona, Kecamatan Towuti, Kab Luwu Timur, Prov. Sulsel
80	PEMDA LUWU TIMUR	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	31-May-22	147.543/31/PKS/PEM-LT/V/2022	Perjanjian Kerjasama (Pks) Penyelenggaraan Transmigrasi Disatuan Permukiman Mahalona Skp C Sp.1 Kawasan Transmigrasi Di Mahalona, Kecamatan Towuti, Kab Luwu Timur, Prov. Sulsel
81	PEMDA LUWU TIMUR	Kab Rembang Provinsi Jawa Tengah	31-May-22	147.543/30/PKS/PEM-LT/V/2022	Perjanjian Kerjasama (Pks) Penyelenggaraan Transmigrasi Disatuan Permukiman Mahalona Skp C Sp.1 Kawasan Transmigrasi Di Mahalona, Kecamatan Towuti, Kab Luwu Timur, Prov. Sulsel

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
82	PEMDA LUWU TIMUR	Kab Sragen Provinsi Jawa Tengah	31-May-22	147.543/14/PKS/PEM-LT/IV/2022	Perjanjian Kerjasama (Pks) Penyelenggaraan Transmigrasi Disatuan Permukiman Mahalona Skp C Sp.1 Kawasan Transmigrasi Di Mahalona, Kecamatan Towuti, Kab Luwu Timur, Prov. Sulsel
83	PEMDA LUWU TIMUR	Kab Kebumen Provinsi Jawa Tengah	31-May-22	147.543/33/PKS/PEM-LT/V/2022	Perjanjian Kerjasama (Pks) Penyelenggaraan Transmigrasi Disatuan Permukiman Mahalona Skp C Sp.1 Kawasan Transmigrasi Di Mahalona, Kecamatan Towuti, Kab Luwu Timur, Prov. Sulsel
84	PEMDA LUWU TIMUR	Pt.Elevenia Sinergi Prima Nusantara	2-Jun-22	147.543/40/KSB/PEM-LT/VI/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Peningkatan Akses Pasar Untuk Produk Lada Dan Komuditas Unggulan Lainnya Kab. Luwu Timur
85	PEMDA LUWU TIMUR	Pt.Boymaxweil Indojoya Group	2-Jun-22	147.543/41/KSB/PEM-LT/VI/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Peningkatan Akses Pasar Untuk Produk Lada Dan Komuditas Unggulan Lainnya Kab. Luwu Timur
86	PEMDA LUWU TIMUR	Koperasi 1000 Desa Ekspor Indonesia	2-Jun-22	147.543/42/KSB/PEM-LT/VI/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Peningkatan Akses Pasar Untuk Produk Lada Dan Komuditas Unggulan Lainnya Kab. Luwu Timur
87	PEMDA LUWU TIMUR	Ukm Mendunia Foundation	2-Jun-22	147.543/43/KSB/PEM-LT/VI/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Peningkatan Akses Pasar Untuk Produk Lada Dan Komuditas Unggulan Lainnya Kab. Luwu Timur
88	PEMDA LUWU TIMUR	Pt.Nusa Berdaya Indonesia	2-Jun-22	147.543/44/KSB/PEM-LT/VI/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Peningkatan Akses Pasar Untuk Produk Lada Dan Komuditas Unggulan Lainnya Kab. Luwu Timur
89	PEMDA LUWU TIMUR	Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung	4-Jul-22	147.543/45/KSB/PEM-LT/VII/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kab Luwu Timur Tahun 2022
90	PEMDA LUWU TIMUR	Kab. Pringserui, Provinsi Lampung	5-Jul-22	147.543/46/KSB/PEM-LT/VII/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kab Luwu Timur Tahun 2022
91	PEMDA LUWU TIMUR	Universitas Cokroaminoto Palopo	26-Jul-26	147.543/47/KSB/PEM-LT/VII/2022	Kesepakatan Bersama Dalam Bidang Pendidikan , Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kegiatan Kemahasiswaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan, Pembangunan Daerah Dan Implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
92	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Prov Sulsel	2-Aug-22	147.543/48/KSB/PEM-LT/VIII/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Kelembagaan Dalam Rangka Fasilitas Penyelenggaraan Penilaian Potensi Dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
93	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Telkom Indonesia	1-Sep-22	147.543/51/KSB/PEM-LT/IX/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Mewujudkan Program Digitalisasi Di Kabupaten Luwu Timur
94	PEMDA LUWU TIMUR	Lan Makassar	1-Sep-22	147.543/51/KSB/PEM-LT/IX/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Serta Pendidikan Tinggi Terapan
95	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Prov Sulsel	26-Sep-22	147.543/55/KSB/PEM-LT/IX/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Bantuan Dana Sharing Bagi Peserta Program Kesehatan Gratis Provinsi Sul-Sel Integrasi Kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Yang Didaftarkan Dan Dibayarkan Iurannya Oleh Pemerintah Daerah
96	PEMDA LUWU TIMUR	Universitas Terbuka	8-Oct-22	147.543/62/KSB/PEM-LT/X/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
97	PEMDA LUWU TIMUR	Bank Sulselbar	10-Oct-22	147.543/63/ADD-PKS/PEM-LT/X/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemakaian Tanah Untuk Anjungan Tunai (Atm)
98	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Prov Sulsel	11-Oct-22	147.543/64/KSB/PEM-LT/X/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Pengendalian Inflasi Antar Daerah Di Provinsi
99	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Malili Industrial Park	13-Oct-22	147.543/65/KSB/PEM-LT/X/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan Pembangunan Kawasan Industri
100	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Vale Indonesia	1-Nov-22	147.543/70/PKS/PEM-LT/XI/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Hibah Hasil Penyaluran Tenaga Listrik
101	PEMDA LUWU TIMUR	Lan Ri Jakarta	7-Dec-22	147.543/72/KSB/PEM-LT/XII/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Serta Pendidikan Tinggi Terapan Tahun 2022
102	PEMDA LUWU TIMUR	Bank Sulselbar	8-Dec-22	147.543/73/MOU/PEM-LT/XII/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Pengembangan Dan Penguatan Aplikasi Koneksi Transaksi Antara Rekening Kas Umum Daerah Dengan Aplikasi Dimda-Ng (Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemda Luwu Timur

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
103	PEMDA LUWU TIMUR	Bank Sulselbar	8-Dec-22	147.543/74/PKS/PEM-LT/XII/2022	Perjanjian Kerjasama Terkait Pengembangan Dan Penguatan Aplikasi Koneksi Transaksi Antara Rekening Kas Umum Daerah Dengan Aplikasi Dimda-Ng (Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemda Luwu Timur
104	PEMDA LUWU TIMUR	Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	21-Dec-22	147.543/75/PKS/PEM-LT/XII/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Naskah Hibah Barang Milik Negara Antara Dirjen Perumahan Pupr Dengan Pemda Luwu Timur
105	PEMDA LUWU TIMUR	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	27-Dec-22	147.543/80/PKS/PEM-LT/XII/2022	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
106	PEMDA LUWU TIMUR	Dinkes Pem Prov Sulsel	28-Dec-22	147.543/81/MOU/PEM-LT/XII/2022	Kesepakatan Bersama Tentang Bantuan Dana Sharin Bagi Peserta Program Kesehatan Gratis Provinsi Sulsel Integrasi Kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemda
107	PEMDA LUWU TIMUR	Universitas Fajar	12-Jan-23	147.543/01/I/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Trdiarma Perguruan Tinggi
108	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN	Pt Telkom Indonesia (Persero) Tbk	24-Jan-23	900/07/SPK Kominfo-SP/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Ahli (Penyusunan Satu Data Pemerintah Kabupaten Luwu Timur) Tahun Anggaran 2023
109	PEMDA LUWU TIMUR	Universitas Bosowa	07-Feb-23	147.543/02/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan Trdiarma Perguruan Tinggi
110	SEKRETARIAT DAERAH	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/05/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
111	DINAS PERIKANAN	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/06/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
112	SEKRETARIAT DPRD	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/07/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Sekretariat Dprd Kabupaten Luwu Timur
113	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/08/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
114	BAPELITBANGDA	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/09/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
115	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/10/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur
116	DPKPP	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/11/II/KSB/PEM-LT/2023 045/21H06/02/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
117	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/12/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Luwu Timur
118	DINAS PERHUBUNGAN	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/13/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur
119	DISDUKCAPIL	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/14/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
120	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/15/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur
121	KECAMATAN BURAU	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/16/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur
122	DINAS KESEHATAN	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/17/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
123	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/18/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
124	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/19/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Luwu Timur
125	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/20/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur
126	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/21/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur
127	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/22/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Umkm Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
128	BKPSDM	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/23/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Kepegawaian Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur
129	INSPEKTORAT	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/24/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
130	BKAD	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/25/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur
131	DINAS PENDIDIKAN	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/26/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
132	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/27/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik Dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
133	BADAN KESBANGPOL	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/28/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Luwu Timur

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
134	SATPOLPP	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/29/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
135	DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/30/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur
136	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/31/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur
137	BPBD	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/32/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
138	DPM PTSP	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/33/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur
139	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/34/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
140	KECAMATAN MALILI	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/35/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur
141	KECAMATAN ANGKONA	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/36/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur
142	KECAMATAN KALAENA	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/37/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur
143	KECAMATAN ANGKONA	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/38/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur
144	KECAMATAN TOWUTI	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/39/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
145	KECAMATAN WASUPONDA	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/40/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur
146	KECAMATAN NUHA	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/41/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur
147	KECAMATAN WOTU	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/42/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur
148	KECAMATAN MANGKUTANA	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/43/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur
149	RSUD I LAGALIGO	Perum Bulog Cabang Palopo	10-Feb-23	147.543/45/II/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pembelian Dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah(Rsud) I La Galigo Kabupaten Luwu Timur
150	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Vale Indonesia (Tbk)	09-Mar-23	147.543/46/III/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Program Dukungan Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri Terfokus Tahun 2023-2025 Pada Wilayah Pemberdayaan Masyarakat Perseroan Terbatas Vale Indonesia Terbuka Di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
151	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Vale Indonesia, Tbk	09-Mar-23	147.543/47/III/PKS/PEM-LT/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Program Integrasi Dukungan Pencapaian Sustainable Development Goals Desa Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri Terfokus Pada Wilayah Pemberdayaan Masyarakat Perseroan Terbatas Vale Indonesia Terbuka Di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
152	PEMDA LUWU TIMUR	Yayasan Save The Children Indonesia	17-Apr-23	147.543/48/III/PKS/PEM-LT/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Program Perlindungan Serta Kesepakatan Perempuan Dan Anak

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
153	PEMDA LUWU TIMUR	Balai Besar Metrologi, Klimatologi Dan Geofisika Wilayah VI Makassar	11-May-23	147.543/59/PKS/PEM-LT/V/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemanfaatan Informasi Di Bidang Meterologi, Klimatologi, Dan Geofisika Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Luwu Timur
				T/HK.07.00/002/KBB4/V/2023	
154	PEMDA LUWU TIMUR	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Rsud I La Galigo	29-May-23	400.12.4.4/217/DISDUKCAPIL	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemanfaatan Nik, Data Kependudukan Dan Ktp Dalam Lingkup Dinas Terkait Rsud I La Galigo
				445/1920/RSUD-ILG	
155	PEMDA LUWU TIMUR	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Dinas Ptsp	29-May-23	400.12.4.4/218/DISDUKCAPIL	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemanfaatan Nik, Data Kependudukan Dan Ktp Dalam Lingkup Dinas Terkait Dinas Ptsp
				000.4.7.1/140/DPMPTSP	
156	PEMDA LUWU TIMUR	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Dinas Sosial P3A	29-May-23	400.12.4.4/219/DISDUKCAPIL	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemanfaatan Nik, Data Kependudukan Dan Ktp Dalam Lingkup Dinas Terkait Dinsos P3A
				400.9/570/DINSOS P3A	
157	PEMDA LUWU TIMUR	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Badan Pendapatan Daerah	29-May-23	400.12.4.4/220/DISDUKCAPIL	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemanfaatan Nik, Data Kependudukan Dan Ktp Dalam Lingkup Dinas Terkait Badan Pendapatan Daerah
				400.12.4.4/326/BAPENDA	
158	PEMDA LUWU TIMUR	Universitas Kristen Indonesia (Uki) Paulus	13-Jun-23	147.543/49/VI/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Pengembangan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
159	PEMDA LUWU TIMUR	Institut Bisnis Dan Keuangan Nitro Makassar	14-Jun-23	147.543/50/VI/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Pengembangan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
160	PEMDA LUWU TIMUR	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	21-Jun-23	147.543/51/VI/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Pelatihan Terakreditasi Di Bidang Kesehatan

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
161	BKPSDM	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	21-Jun-23	893.5/638/V/BKPSDM/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelatihan Teknologi Konstrasepsi Terkini Atau Contraception Technologu Updtae Bagi Tenaga Kesehatan Angkatan I Tahun 2023
162	BKPSDM	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	21-Jun-23	893.5/639/VI/BKPSDM/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelatihan Teknologi Konstrasepsi Terkini Atau Contraception Technologu Updtae Bagi Tenaga Kesehatan Angkatan II Tahun 2023
163	BKPSDM	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	21-Jun-23	893.5/640/VI/BKPSDM/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelatihan Teknologi Konstrasepsi Terkini Atau Contraception Technologu Updtae Bagi Tenaga Kesehatan Angkatan Iii Tahun 2023
164	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Asuransi Jasa Indonesia	26-Jun-23	147.543/54/VI/KSB/PEM-LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
165	DISPKP KAB. LUWU TIMUR	Pt Asuransi Jasa Indonesia	26-Jun-23	500.6/1841/DISPKP/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi
166	PEMDA LUWU TIMUR	Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung	10-Jul-23	147.543/57/VIII/KSB/PEM- LT/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
167	PEMDA LUWU TIMUR	Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	10-Jul-23	147.543/55/VIII/KSB/PEM- LT/2023	Pkesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
168	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kab Lampung Tengah Provinsi Lampung	10-Jul-23	147.543/58/VIII/PSK/PEM- LT/2023	Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Mahalona Skp C Sp.1 Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
169	PEMDA LUWU TIMUR	Pemerintah Kab Lampung Selatan Provinsi Lampung	10-Jul-23	147.543/58/VIII/PKS/PEM- LT/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Di Kabupaten Luwu Timur
170	PEMDA LUWU TIMUR	Tim Penggerak Pkk Kabupaten Luwu Timur	21-Aug-23	147.543/85/KSB/PEM- LT/VIII/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pkk
171	PEMDA LUWU TIMUR	Pengadilan Negeri Malili	21-Aug-23	217/KPN.W22- U22/TI1.1/VIII/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Penyediaan Inovasi Layanan Pengadilan Negeri Malili Generasi Online
172	PEMDA LUWU TIMUR	Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia	22-Aug-23	147.543/91/PKS/PEM- LT/VIII/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Jasa Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Uttp) Timbangan Jembatan
173	PEMDA LUWU TIMUR	Provinsi Sulawesi Selatan	28-Aug-23	147.543/93/KSB/PEM- LT/VIII/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Di Sulawesi Selatan
174	PEMDA LUWU TIMUR	Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung	31-Aug-23	147.543/94/KSB/PEM- LT/VIII/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
175	DISPKP KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kab Mesuji Provinsi Lampung	31-Aug-23	147.543/95/PKS/PEM- LT/VIII/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Transmigrasi Di Satuan Peremukiman Mahalona Skp C Sp.1 Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
176	PEMDA LUWU TIMUR	Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan	31-Aug-23	147.543/89/KSB/PEM- LT/VIII/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Pelayanan Tera-Tera Ulang Timbangan Jembatan
177	PEMDA LUWU TIMUR	Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan	31-Aug-23	147.543/90/PKS/PEM- LT/VIII/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Jasa Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Uttp) Timbangan Jembatan
178	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Cabang Malili	18-Sep-23	147.543/96/PKS/PEM-LT/IX/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemakaian Tanah Aset Daerah Untuk Lokasi Anjungan Tunai Mandiri

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
179	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Bank Negara Indonesia (Perseo) Tbk Kantor Cabang Palopo	18-Sep-23	147.543/97/PKS/PEM-LT/IX/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemakaian Tanah Aset Daerah Untuk Lokasi Anjungan Tunai Mandiri
180	DISDAKOP	Pengusaha Bapak Arif Aras, Se	01-Oct-23	510/611/PK/DAGKOP- UKMP/X/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemakaian Aset Daerah Bangunan Lantai Dua Di Pasar Malindungi, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha
181	PEMDA LUWU TIMUR	Pt.Rusky Aero Indonesia	04-Oct-23	147.543/99/KSB/PEM-LT/X/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Penyediaan Aksesibilitas Angkutan Kargo Ekspor Udara Secara Langsung Flight Direct) Dari Makassar Ke Luar Negeri
182	PEMDA LUWU TIMUR	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	13-Oct-23	147.543/100/KSB/PEM-LT/X/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
183	PEMDA LUWU TIMUR	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	13-Oct-23	147.543/101/PKS/PEM-LT/X/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Mahalona Skp C Sp.1 Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
184	PEMDA LUWU TIMUR	Pt Bank Rakyat Indonesia (Perseo) Tbk Kantor Cabang Masamba	20-Oct-23	147.543/104/PKS/PEM-LT/X/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemakaian Tanah Aset Daerah Untuk Lokasi Anjungan Tunai Mandiri
185	PEMDA LUWU TIMUR	Bpjs Ketenagakerjaan	31-Oct-23	147.543/102/KSB/PEM-LT/X/2023	Kesepakatan Bersama Tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Upah Jasa Dan Pekerja Rentan Di Kabupaten Luwu Timur
186	PEMDA LUWU TIMUR	Bpjs Ketenagakerjaan	31-Oct-23	147.543/103/PKS/PEM-LT/X/2023	Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Luwu Timur
187	PEMDA LUWU TIMUR	Universitas Hasanuddin	06-Nov-23	147.543/106/PKS/PEM-LT/XI/2023	Pemberian Dana Hibah Abadi

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
188	PEMDA LUWU TIMUR	Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat	21-Dec-23	147.543/108/KSB/PEM-LT/XII/2023	Hibah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
189	PEMDA LUWU TIMUR	Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat	21-Dec-23	147.543/108/KSB/PEM-LT/XII/2023	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
190	PEMDA LUWU TIMUR	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	19-Oct-23	147.543/101/PKS/PEM-LT/X/2023	Terkait Pelaksanaan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Mahalona Skp C Sp.1 Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
191	PEMDA LUWU TIMUR	Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur	21-Aug-23	147.543/85/KSB/PEM-LT/VIII/2023	Kerjasama Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
192	PEMDA LUWU TIMUR	Yayasan Save The Children Indonesia	31/11/2022	147.543/71/KSB/PEM-LT/XI/2023	Kerjasama Di Bidang Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
193	PEMDA LUWU TIMUR	Kejaksaan Negeri Luwu Timur	31-Aug-23	147.543/92/KSB/PEM-LT/VIII/2023 B-02/P.4.58/Gs.2/08/2023	Layanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
194	PEMDA LUWU TIMUR	Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat	21-Dec-23	147.543/107/KSB/PEM-LT/XII/2023	Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengembangan Potensi Daerah
195	PEMDA LUWU TIMUR	Universitas Hasanuddin	05-Jul-23	147.543/13/KSB/PEM-LT/VII/2023	Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
196	BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	05-Feb-24	100.3.7.1/002/KSB/PEM-LT/II/2024	Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik
197	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR	PT Aserra Ferolindo Sejahtera	30-Apr-24	100.3.7.1/005/KSB/PEM-LT/IV/2024	Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel
198	DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan	30-Apr-24	100.3.7.1/006/KSB/PEM-LT/IV/2024	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah di Kabupaten Luwu Timur

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
199	DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah	26-Jun-24	100.3.7.1/017/KSB/PEM-LT/VI/2024	Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
200	DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR	Universitas Megarezky	15-Jul-24	100.3.7.1/019/KSB/PEM-LT/VI/2024	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
201	DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah	8-Jul-24	100.3.7.1/20/KSB/PEM-LT/VII/2024	Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
202	DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR	Lentera Inspirasi Indonesia	6-May-24	100.3.7.1/011/KSB/PEM-LT/V/2024	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
203	DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Serang Provinsi Banten	4-Jul-24	100.3.7.1/019/KSB/PEM-LT/VII/2024	Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi
204	DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR	Stikes Bataraguru Soroaka	21-Aug-24	100.3.7.1/020/KSB/PEM-LT/VIII/2024	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
205	DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR	Perum Bulog Cabang Palopo	2-Sep-24	100.3.7.1/029/KSB/PEM-LT/IX/2024	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
206	DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah	9-Sep-24	100.3.7.1/031/KSB/PEM-LT/IX/2024	Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi
207	DISDAKOP KAB. LUWU TIMUR	PT Midi Utama Indonesia, Tbk	20-Sep-24	100.3.7.1/34/KSB/PEM-LT/IX/2024	Fasilitasi Pemasaran Produk Usaha Mkro, Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur
208	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KAB. LUWU TIMUR	Yayasan Save The Children Indonesia	31-Oct-24	100.3.7.1/042/KSB/PEM-LT/X/2024	Perlindungan, Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak di Kabupaten Luwu Timur
209	DPRD KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	19-Aug-24	100.3.7.1/076/VIII/PEMOTDA-KB/2024	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
				100.3.7.1/023/KSB/PEM-LT/VIII/2024	

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
210	DISDAKOP KAB. LUWU TIMUR	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, Dan Maritim Kementerian Perindustrian	15-Nov-24	B/6867/BBSPJIHPMM/HK/XI/2024	Peningkatan Daya Saing Industri Melalui Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
				100.3.7.1/043/KSB/PEM-LT/XI/2024	
211	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan	9-Dec-24	100.3.7.1/18/PEM-SETDA/XII/2024	Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Desa di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur
				100.3.7.1/044/KSB/PEM-LT/XII/2024	
212	DINKES KAB. LUWU TIMUR	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Palopo	20-Dec-24	100.3.7.1/046/KSB/PEM-LT/XII/2024	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
213	BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	5-Feb-24	100.3.7.1/003/PKS/PEM-LT/II/2024	Manajemen Aparatur Sipil Negara
214	BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	27-Feb-24	100.3.7.1/001/PKS/PEM-LT/II/2024	Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Luwu Timur
215	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. LUWU TIMUR	PT Asuransi Jasa Indonesia	13-Mar-24	100.3.7.1/004/PKS/PEM-LT/II/2024	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi
216	BAPENDA KAB. LUWU TIMUR	PT PLN UP3 Palopo	28-Feb-24	147.543/08/II/KSB/PEM-LT/2023	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik dan Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum
217	DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah	28-May-24	100.3.7.1/007/PKS/PEM-LT/V/2024	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas dan Penempatan serta Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C Koromolai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
218	DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi Jawa Barat	10-Jun-24	100.3.7.1/008/PKS/PEM-LT/VI/2024	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas dan Penempatan serta Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C Koromolai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
219	DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kota Yogyakarta Provinsi Yogyakarta	10-Jun-24	100.3.7.1/009/PKS/PEM- LT/VI/2024	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas dan Penempatan serta Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C Koromolai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
220	DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten	10-Jun-24	100.3.7.1/012/PKS/PEM- LT/VI/2024	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas dan Penempatan serta Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C Koromolai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
221	DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta	11-Jun-24	100.3.7.1/010/PKS/PEM- LT/VI/2024	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas dan Penempatan serta Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C Koromolai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
222	BPBD KAB. LUWU TIMUR	Komando Distrik Militer 1403 Palopo	11-Jun-24	100.3.7.1/014/PKS/PEM- LT/VI/2024	Kegiatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur
223	KESBANGPOL KAB. LUWU TIMUR	Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar	24-Jun-24	100.3.7.1/015/PKS/PEM- LT/VI/2024	Pengukuran Indeks Kerukunan Ummat Beragama
224	DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR	Universitas Terbuka	19-Jun-24	100.3.7.1/016/PKS/PEM- LT/VI/2024	Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Pemda Kepada UT
225	DISTRANSNAKER KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah	26-Jun-24	100.3.7.1/018/PKS/PEM- LT/VI/2024	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas dan Penempatan serta Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C Koromolai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
226	DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR	Toko King Stationery	27-Aug-24	100.3.7.1/024/PKS/PEM- LT/VIII/2024	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak Kabupaten Luwu Timur
227	DISDUKCAPIL KAB. LUWU TIMUR	Praktik Mandiri Bidan Hasni	27-Aug-24	100.3.7.1/025/PKS/PEM- LT/VIII/2024	Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pemanfaatan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Luwu Timur

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/ KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
228	DISNAKERTRANS KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Serang Provinsi Banten	26-Aug-24	100.3.7.1/028/PKS/PEM-LT/VIII/2024	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas dan Penempatan serta Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C Koromolai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
229	DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR	Perum Bulog Cabang Palopo	5-Sep-24	100.3.7.1/030/PKS/PEM-LT/IX/2024	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
230	DISNAKERTRANS KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah	23-Sep-24	100.3.7.1/033/PKS/PEM-LT/IX/2024	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas dan Penempatan serta Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C Koromolai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
231	DISNAKERTRANS KAB. LUWU TIMUR	Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah	30-Sep-24	100.3.7.1/40/PKS/PEM-LT/IX/2024	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas dan Penempatan serta Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Mahalona Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C Koromolai Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
232	DISDAKOP KAB. LUWU TIMUR	PT Midi Utama Indonesia, Tbk	28-Sep-24	100.3.7.1/37/PKS/PEM-LT/IX/2024	Fasilitasi Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur
233	DISDAKOP KAB. LUWU TIMUR	PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	28-Sep-24	100.3.7.1/38/PKS/PEM-LT/IX/2024	Fasilitasi Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur
234	DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR	BPJS Ketenagakerjaan	14-Oct-24	100.3.7.1/041/PKS/PEM-LT/X/2024	Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Rakyat Kabupaten Luwu Timur
235	DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin	13-Dec-24	800.2.4.2/1244/BKPSDM/2024	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Hukum Administrasi Pemerintahan Tahun 2024
236	DINKES KAB. LUWU TIMUR	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Palopo	20-Dec-24	100.3.7.1/047/PKS/PEM-LT/XII/2024	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dalam Rangka Universal Health Coverage Di Kabupaten Luwu Timur

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah, Perangkat Daerah dan masyarakat dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah yang menjadi permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Kualitas pelaksanaan kebijakan pelayanan publik masih perlu di tingkatkan;
2. Monitoring dan evaluasi dalam bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi belum optimal;
3. Pengelolaan Barang/Aset pada Setda masih belum tertib dan optimal;
4. Masih kurangnya kualitas komponen pelaporan kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
5. Belum maksimalnya peran BUMD dalam memberikan Deviden kepada Pemerintah untuk meningkatkan PAD;
6. Belum Optimalnya Sosialisasi Peraturan Bupati terkait Bantuan Beasiswa Kabupaten Luwu Timur;
7. Pengurus lembaga/organisasi keagamaan belum/tidak memahami pedoman dan prosedur pengajuan proposal dan pelaporan penggunaan dana hibah secara baik dan benar;
8. Belum Optimalnya Sosialisasi Peraturan Bupati terkait tata cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
9. Kurangnya pemahaman organisasi Perangkat Daerah terkait proses pengadaan barang dan jasa;
10. Capaian IKK LPPD belum optimal, dan pengumpulan data pendukung dari perangkat daerah masih lambat;
11. Upaya Pengelolaan JDIH perlu ditingkatkan;
12. Belum adanya standar baku terkait pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan.
13. Kompetensi ASN belum merata dan kualifikasi pegawai blm sesuai kebutuhan teknis.
14. Evaluasi kinerja ASN yang masih belum memadai mengakibatkan rendahnya akuntabilitas kinerja daerah;

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan Identifikasi permasalahan terhadap pelayanan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maka ditetapkan beberapa Isu Strategis Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2026-2029 yaitu :

1. Optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui penguatan koordinasi yg efektif, sinkronisasi, kolaboratif dan harmonisasi kebijakan antar perangkat daerah.
2. Peningkatan kualitas Pendidikan.
3. Keahlian Sumber Daya Manusia dalam pengadaan masih sangat terbatas.
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi barang dan jasa.
5. Kontribusi BUMD terhadap pendapatan Asli Daerah(PAD) masih belum maksimal.
6. Perlu adanya peningkatan dalam layanan keprotokolan.
7. Pengembangan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah agar cakap dan terampil dalam era digital dan pelayanan publik yang unggul demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Transformasi digital dlm penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk e-office, e-arsip dan big data pemerintahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Tujuan Renstra merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi Bupati Luwu Timur yaitu “ *Luwu Timur Maju dan Sejahtera*” Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Luwu Timur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah mengemban Misi ke-5 RPJMD yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital**” dengan tujuan RPJMD “*Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)*”. Dan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu “ **Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik**”

Adapun penjabaran keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD ke dalam Tujuan Renstra Sekretariat Daerah

RPJMD			RENSTRA
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur

Sasaran Sekretariat Daerah juga merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Sekretariat Daerah merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Daerah serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruhnya yang berarti menyangkut keseluruhan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam tabel

3.2 Sebagai Berikut :

Tabel 3.2
TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Nilai SAKIP (Nilai)	67,77	70,01	70,42	71,82	73,3	74,5	76,10	
		Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah Daerah	Indeks tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (Nilai)	69,41	71	72,5	75,8	77,25	80	81,50	
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	97,96	97,98	98	98,25	98,5	98,75	99,00	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks BerAKHLAK (Indeks)	73,23	78,3	80	85,01	89,01	90,05	91,40	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	86,32	87,03	87,24	88,02	89,9	90,05	90,25	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	58,3	67,3	70,15	73,12	77,71	80,15	81,75	

Berdasarkan Tabel diatas maka rumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tujuan Strategis

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik terwujud melalui interaksi positif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta adanya prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, penegakan hukum, dan responsivitas, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan semua kebijakan dan keputusan pemerintah dilakukan secara efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik, sehingga hak-hak masyarakat terpenuhi dan tercipta keadilan. untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan melalui berbagai cara yaitu :

- ❖ Reformasi Birokrasi, dengan melakukan perbaikan pada kelembagaan, prosedur, dan sumber daya manusia di pemerintahan agar lebih efektif dan efisien.
- ❖ Penguatan Kemitraan, dengan membangun sinergi dan kerja sama yang dinamis antara pemerintah, swasta dan masyarakat melalui proses komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama.
- ❖ Evaluasi dan Peningkatan, dengan melakukan evaluasi secara teratur terhadap kinerja pemerintah dan lembaga publik untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- ❖ Pemanfaatan teknologi, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.
- ❖ Orientasi pada Kesejahteraan Publik, dengan memastikan bahwa semua kebijakan dan pembangunan diarahkan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah mengacu pada perbaikan dalam cara pemerintah daerah menjalankan urusan publik dan mengelola sumber daya publik. Perbaikan ini mencakup peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Tata kelola yang baik menciptakan

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kunci sukses tercapainya proiritas pembangunan adalah tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja	Defenisi /Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi	Sumber Data
Indeks Reformasi Hukum	IRH adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional yang terdiri dari 4 variabel: 1. Tingkat koordinasi harmonisasi; 2. Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan; 3. Kualitas Re-regulasi atau deregulasi; dan 4. Pengelolaan JDIH	Indeks Reformasi Hukum (IRH) ditetapkan sebagai indikator kinerja Bagian Hukum untuk mendukung penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan capaian kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Hukum yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI setiap tahun	Bagian Hukum
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP) selama 1 (satu) Tahun	Capaian Kinerja Setiap Nilai indeks tata Kelola pengadaan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena merupakan Bagian dari Penilaian dari Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Tata kelola Pengadaan selama 1 (satu) Tahun	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah mewujudkan perangkat daerah yang mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara terukur, efektif, efisien, dan transparan sesuai visi, misi, serta tujuan yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong kinerja aparatur yang lebih profesional dan berintegritas.

Indikator Kinerja	Defenisi /Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi	Sumber Data
Indeks BerAKHLAK	Indeks BerAKHLAK merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara)	Indeks berAKHLAK Merupakan alat ukur yang mengukur sejauh mana nilai-nilai BerAKHLAK telah diimplementasikan dan dirasakan oleh ASN dalam lingkungan kerjanya.	Indeks berAKHLAK merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian PANRB	Bagian Organisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. IKM mengukur seberapa baik pelayanan yang diberikan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Pengukuran IKM dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kualitas pelayanan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat Kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Penilaian dari survey kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:14 Tahun 2017 Tanggal 9 Mei 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah	Bagian Organisasi
Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada perangkat daerah adalah hasil penilaian terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Nilai SAKIP ini berfungsi sebagai indikator tingkat akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan organisasi.	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perangkat daerah menggambarkan tingkat keberhasilan implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Nilai ini didasarkan pada evaluasi terhadap berbagai dokumen SAKIP seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.	Hasi Evaluasi (LHE) Inspektorat	Laporan Kinerja Sekretariat Daerah dan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rencana Tindakan yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah atau upaya yang dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan dan subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Adapun penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai Berikut

Tabel.3.3
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Review Kinerja Pelayanan Publik dan Penyederhanaan Organisasi	Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Pelayanan Publik	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Memperkuat tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis Kinerja	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berdasarkan RENSTRA Sekretariat

Daerah. Rumusan kebijakan yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	

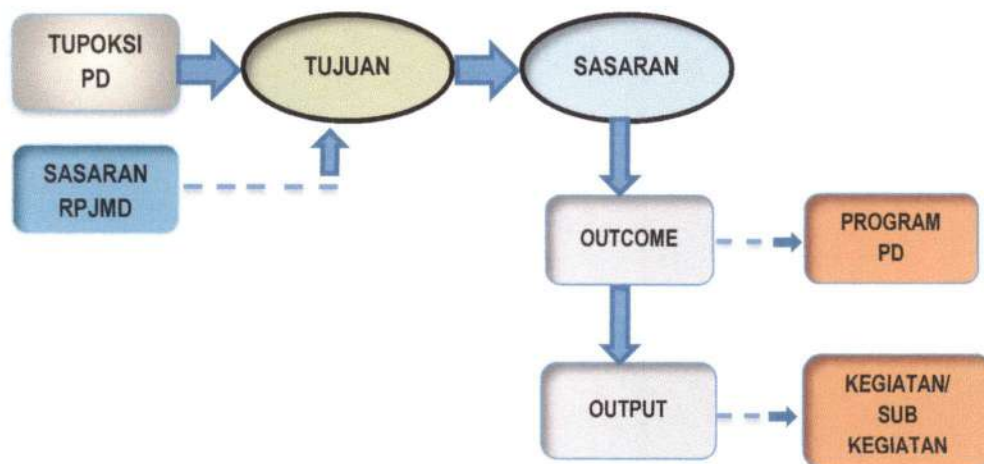
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif, sesuai dengan tugas dan Fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur menetapkan program - Program prioritas yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur yaitu *mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif*.

Gambar 4.1.
Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan, Sub kegiatan
Rencana Strategis Perangkat Daerah



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah							
Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				Nilai SAKIP Daerah (Nilai)		Nilai Evaluasi KEMENPAN RB
		Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah Daerah			Indeks tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (Nilai)		Nilai Evaluasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		Nilai Evaluasi Dari KEMENHUKAM
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan dan terselesaikannya penanganan perkara dan permasalahan hukum		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan dibagi rancangan produk hukum daerah yang direncanakan/diusulkan dikali 100%
					Persentase Perkara dan Permasalahan hukum yang selesai ditangani (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah perkara dan permasalahan hukum yang selesai ditangani dibagi jumlah perkara dan permasalahan hukum yang dilaporkan dikali 100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terselesaikannya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Penyelesaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dibagi jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan/ditangani x 100%
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai LPPD (Nilai)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kemendagri
				Terselenggaranya Administrasi Tata Pemerintahan dengan baik	Persentase Pelaksanaan administrasi tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan/ Target kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang akan dilaksanakan x 100

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerjasama daerah yang difasilitasi
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
			Meningkatnya kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan/Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang akan dilaksanakan x 100
				Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan		Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan/Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang akan dilaksanakan x 100

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Layanan pengadaan Barang dan Jasa		Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Penilaian LKPP terhadap Proses Pengadaan Barang Jasa
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya administrasi Pembangunan	Jumlah kebijakan pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			Meningkatnya Kualitas Layanan pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Indeks BerAKHLAK (Indeks)		Nilai Evaluasi Menpan RB
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		Nilai Evaluasi Menpan RB
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		Nilai Evaluasi LAKIP oleh Inspektorat Kabupaten
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi		Meningkatkan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kegiatan penunjang yang berjalan sesuai standar/total kegiatan penunjang x 100
					Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah target kinerja tercapai/Jumlah target kinerja ditetapkan x 100
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pengelolaan keuangan berjalan efektif dan sesuai perencanaan	Persentase realisasi anggaran terhadap rencana anggaran	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran/total anggaran yang direncanakan x 100
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah dengan baik	Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset teradministrasi/jumlah aset keseluruhan x 100

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Realisasi Pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dibagi target pendapatan kewenangan perangkat daerah x 100%
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola sesuai standar	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian sesuai standar/ Jumlah dokumen kepegawaian keseluruhan x 100%
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Administrasi Umum yang mendukung kelancaran Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi tepat waktu/Jumlah layanan administrasi keseluruhan x 100%
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang sesuai kebutuhan/Jumlah barang yang diadakan x 100%
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara secara berkala	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang yang dipelihara/Jumlah barang keseluruhan x 100%
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Administrasi Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Realisasi Laporan Administrasi Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah/Jumlah Laporan Administrasi Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah x 100%
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan WKDH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Rumah Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Mess Pemerintah Daerah	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, dan Mess Pemerintah Daerah/ Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, dan Mess Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan)x 100%
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Terwujudnya Penataan organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penataan organisasi	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	Jumlah PD yang dilakukan Penataan Organisasi /Jumlah Perangkat Daerah x

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
							100 %
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Kegiatan Keptokoleran, Komunikasi dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase layanan keptokoleran dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Realisasi Layanan Keptokoleran Komunikasi pimpinan yang dilaksanakan/ Jumlah Layanan Keptokoleran Komunikasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
							Pimpinan yang akan dilaksanakan x 100
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

Dalam rangka percepatan implementasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang diharapkan mampu menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Adapun pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026 – 2030 dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 2026-2030
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				120.110.745.983,50		118.270.783.393,02		118.171.762.371		133.118.957.276		138.639.561.190	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				38.993.190.636,50		38.974.648.524,02		38.588.395.323		43.384.592.860		45.905.196.775	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	94,63	100	38.993.190.636,50	100	38.974.648.524,02	100	38.588.395.323	100	43.384.592.860	100	45.905.196.775	
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				187.920.450,00		187.920.450,00		203.605.450,00		200.856.450,00		206.504.450,00	
Meningkatkan kinerja perencanaan, penganga ran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100	100	187.920.450,00	100	187.920.450,00	100	203.605.450,00	100	200.856.450,00	100	206.504.450,00	
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				73.690.000,00		73.690.000,00		82.857.000,00		79.908.000,00		82.732.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	73.690.000,00	2	73.690.000,00	2	82.857.000,00	2	79.908.000,00	2	82.732.000,00	
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15.532.500,00		15.532.500,00		15.532.500,00		15.532.500,00		15.532.500,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	2	15.532.500,00	2	15.532.500,00	2	15.532.500,00	2	15.532.500,00	2	15.532.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)												
4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.099.950,00		7.099.950,00		7.399.950,00		7.599.950,00		7.599.950,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	2	7.099.950,00	2	7.099.950,00	2	7.399.950,00	2	7.599.950,00	2	7.599.950,00	
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				91.598.000,00		91.598.000,00		97.816.000,00		97.816.000,00		100.640.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	91.598.000,00	10	91.598.000,00	10	97.816.000,00	10	97.816.000,00	10	100.640.000,00	
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.179.051.852,50		18.079.111.854,02		18.447.991.124,00		19.954.624.452,00		20.925.920.361,00	
Terlaksananya pengelolaan keuangan berjalan efektif dan sesuai perencanaan	Persentase realisasi anggaran terhadap rencana	96,09	100	18.179.051.852,50	100	18.079.111.854,02	100	18.447.991.124,00	100	19.954.624.452,00	100	20.925.920.361,00	
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.837.103.552,50		17.837.163.554,02		18.193.926.824,00		19.593.509.152,00		20.557.805.061,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80	137	17.837.103.552,50	137	17.837.163.554,02	137	18.193.926.824,00	140	19.593.509.152,00	145	20.557.805.061,00	
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				282.927.000,00		182.927.000,00		188.825.000,00		282.927.000,00		282.927.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	9	9	282.927.000,00	9	182.927.000,00	9	188.825.000,00	9	282.927.000,00	9	282.927.000,00	
4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				59.021.300,00		59.021.300,00		65.239.300,00		78.188.300,00		85.188.300,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	12	59.021.300,00	14	59.021.300,00	14	65.239.300,00	12	78.188.300,00	12	85.188.300,00	
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.989.200,00		90.989.200,00		90.989.200,00		110.207.200,00		110.207.200,00	
Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah dengan baik	Persentase data barang milik daerah yang teradministrasi dengan baik	100	100	100.989.200,00	100	90.989.200,00	100	90.989.200,00	100	110.207.200,00	100	110.207.200,00	
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100.989.200		90.989.200		90.989.200		110.207.200		110.207.200	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	100.989.200	12	90.989.200	12	90.989.200	12	110.207.200	12	110.207.200	
4.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				38.682.700,00		28.682.700,00		31.951.700,00		34.900.700,00		34.900.700,00	
Terlaksananya Administrasi Pendapatan	Persentase Realisasi	100	100	38.682.700,00	100	28.682.700,00	100	31.951.700,00	100	34.900.700,00	100	34.900.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Daerah	pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah												
4.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				38.682.700,00		28.682.700,00		31.951.700,00		34.900.700,00		34.900.700,00	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	38.682.700,00	12	28.682.700,00	12	31.951.700,00	12	34.900.700,00	12	34.900.700,00	
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				420.959.000,00		430.959.000,00		340.623.199,00		395.519.699,00		536.870.532,00	
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen kepegawaian yang terkelola sesuai standar	100	100	420.959.000,00	100	430.959.000,00	100	340.623.199,00	100	395.519.699,00	100	536.870.532,00	
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				121.700.000,00		121.700.000,00		28.000.000,00		62.500.000,00		200.901.833	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	125	121.700.000,00	125	121.700.000,00	35	28.000.000,00	75	62.500.000,00	137	200.901.833	
4.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				83.039.800,00		83.039.800,00		83.454.999,00		91.800.499,00		91.800.499,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	83.039.800,00	12	83.039.800,00	12	83.454.999,00	12	91.800.499,00	12	91.800.499,00	
4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				74.782.000,00		74.782.000,00		77.731.000,00		74.782.000,00		77.731.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-o-	29	22	74.782.000,00	22	74.782.000,00	23	77.731.000,00	22	74.782.000,00	23	77.731.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Undangan (Orang)												
4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				141.437.200,00		151.437.200,00		151.437.200,00		166.437.200,00		166.437.200,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	32	25	141.437.200,00	25	151.437.200,00	25	151.437.200,00	25	166.437.200,00	25	166.437.200,00	
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.690.457.620,00		3.828.008.597,00		3.828.008.597,00		4.310.809.456,00		4.410.809.456,00	
Terselenggaranya Administrasi Umum yang mendukung kelancaran Fungsi Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang selesai tepat waktu	98,38	100	3.690.457.620	100	3.828.008.597,00	100	3.828.008.597,00	100	4.310.809.456,00	100	4.410.809.456,00	
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				73.995.000,00		81.801.473,00		81.801.473,00		89.981.620,00		89.981.620,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	40	73.995.000,00	40	81.801.473,00	40	81.801.473,00	40	89.981.620,00	40	89.981.620,00	
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				124.280.000,00		136.708.000,00		136.708.000,00		150.378.800,00		150.378.800,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	7	5	124.280.000,00	5	136.708.000,00	5	136.708.000,00	5	150.378.800,00	5	150.378.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Disediakan (Paket)												
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				576.900.000,00		634.590.000,00		634.590.000,00		698.049.000,00		698.049.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	7	576.900.000,00	7	634.590.000,00	7	634.590.000,00	7	698.049.000,00	7	698.049.000,00	
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				325.375.040,00		357.912.544,00		357.912.544,00		393.703.798,00		393.703.798,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	50	17	325.375.040,00	17	357.912.544,00	17	357.912.544,00	17	393.703.798,00	17	393.703.798,00	
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				53.570.000,00		58.927.000,00		58.927.000,00		64.819.700,00		64.819.700,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	11	53.570.000,00	11	58.927.000,00	11	58.927.000,00	11	64.819.700,00	11	64.819.700,00	
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				217.320.000,00		239.052.000,00		239.052.000,00		262.957.200,00		262.957.200,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	165	165	217.320.000,00	165	239.052.000,00	165	239.052.000,00	165	262.957.200,00	165	262.957.200,00	
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				502.725.300,00		502.725.300,00		502.725.300,00		652.997.830,00		752.997.830,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	502.725.300,00	12	502.725.300,00	12	502.725.300,00	12	652.997.830,00	12	752.997.830,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.816.292.280,00		1.816.292.280,00		1.816.292.280,00		1.997.921.508,00		1.997.921.508,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	1.816.292.280,00	12	1.816.292.280,00	12	1.816.292.280,00	12	1.997.921.508,00	12	1.997.921.508,00	
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.037.448.000,00		1.199.499.800,00		859.197.800,00		1.502.322.580,00		1.745.322.580,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan barang yang sesuai dengan rencana kebutuhan	66,7	100	1.037.448.000,00	100	1.199.499.800,00	100	859.197.800,00	100	1.502.322.580,00	100	1.745.322.580,00	
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				377.950.000,00		718.252.000,00		377.950.000,00		513.850.000,00		1.133.850.000,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	377.950.000,00	1	718.252.000,00	1	377.950.000,00	1	513.850.000,00	1	1.133.850.000,00	
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.750.000,00		110.825.000,00		110.825.000,00		121.907.500,00		121.907.500,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	98	15	100.750.000,00	15	110.825.000,00	15	110.825.000,00	15	121.907.500,00	15	121.907.500,00	
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				146.748.000,00		161.422.800,00		161.422.800,00		277.565.080,00		277.565.080,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	19	28	146.748.000,00	22	161.422.800,00	21	161.422.800,00	21	277.565.080,00	21	277.565.080,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				412.000.000,00		209.000.000,00		209.000.000,00		589.000.000,00		212.000.000,00	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1	412.000.000,00	1	209.000.000,00	1	209.000.000,00	1	589.000.000,00	1	212.000.000,00	
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.667.600.000,00		1.754.360.000,00		1.754.360.000,00		2.017.796.000,00		2.317.796.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai dengan kebutuhan urusan pemerintahan	100	100	1.667.600.000,00	100	1.754.360.000,00	100	1.754.360.000,00	100	2.017.796.000,00	100	2.317.796.000,00	
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.091.600.000,00		1.200.760.000,00		1.200.760.000,00		1.320.836.000,00		1.620.836.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.091.600.000,00	12	1.200.760.000,00	12	1.200.760.000,00	12	1.320.836.000,00	12	1.620.836.000,00	
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				576.000.000,00		553.600.000,00		553.600.000,00		696.960.000,00		696.960.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	576.000.000,00	12	553.600.000,00	12	553.600.000,00	12	696.960.000,00	12	696.960.000,00	
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.904.394.000,00		2.804.394.000,00		2.458.945.330,00		4.184.833.400,00		4.355.925.490,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah		83,35	100	3.904.394.000,00	100	2.804.394.000,00	100	2.458.945.330,00	100	4.184.833.400,00	100	4.355.925.490,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				961.619.000,00		861.619.000,00		947.780.900,00		947.780.900,00		1.042.558.990,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45	40	961.619.000,00	40	861.619.000,00	40	947.780.900,00	40	947.780.900,00	40	1.042.558.990,00	
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				33.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	33.000.000,00	2	33.000.000,00	2	33.000.000,00	2	33.000.000,00	2	33.000.000,00	
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				67.820.000,00		67.820.000,00		74.602.000,00		74.602.000,00		82.062.200,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	59	74	67.820.000,00	50	67.820.000,00	35	74.602.000,00	30	74.602.000,00	30	82.062.200,00	
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				235.330.000,00		235.330.000,00		258.863.000,00		258.863.000,00		284.749.300,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	115	125	235.330.000,00	120	235.330.000,00	115	258.863.000,00	100	258.863.000,00	100	284.749.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.606.625.000,00		1.606.625.000,00		1.141.399.430,00		2.867.287.500,00		2.906.625.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	10	2.606.625.000,00	10	1.606.625.000,00	10	1.141.399.430,00	10	2.867.287.500,00	10	2.906.625.000,00	
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				3.942.452.814,00		4.847.487.923,00		4.849.487.923,00		4.849.487.923,00		5.137.705.006,00	
Terlaksananya administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Administrasi Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75	100	3.942.452.814,00	100	4.847.487.923,00	100	4.849.487.923,00	100	4.849.487.923,00	100	5.137.705.006,00	
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				792.153.294,00		871.368.623,00		871.368.623,00		871.368.623,00		958.505.486,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	792.153.294,00	2	871.368.623,00	2	871.368.623,00	2	871.368.623,00	2	958.505.486,00	
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				169.000.000,00		169.000.000,00		169.000.000,00		169.000.000,00		185.900.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9	9	169.000.000,00	9	169.000.000,00	9	169.000.000,00	9	169.000.000,00	9	185.900.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	yang Disediakan (Paket)												
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				60.000.000,00		66.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		72.000.000,00	
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	8	8	60.000.000,00	8	66.000.000,00	8	68.000.000,00	8	68.000.000,00	8	72.000.000,00	
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.921.299.520,00		3.741.119.300,00		3.741.119.300,00		3.741.119.300,00		3.921.299.520,00	
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	2.921.299.520,00	2	3.741.119.300,00	2	3.741.119.300,00		3.741.119.300,00	2	3.921.299.520,00	
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				3.029.100.000,00		3.029.100.000,00		3.029.100.000,00		3.029.100.000,00		3.029.100.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Rumah Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Mess Pemerintah Daerah	100	100	3.029.100.000,00	100	3.029.100.000,00	100	3.029.100.000,00	100	3.029.100.000,00	100	3.029.100.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3	3	1.550.000.000,00	3	1.550.000.000,00	3	1.550.000.000,00	3	1.550.000.000,00	3	1.550.000.000,00	
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				1.116.000.000,00		1.116.000.000,00		1.116.000.000,00		1.116.000.000,00		1.116.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3	3	1.116.000.000,00	3	1.116.000.000,00	3	1.116.000.000,00	3	1.116.000.000,00	3	1.116.000.000,00	
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				363.100.000,00		363.100.000,00		363.100.000,00		363.100.000,00		363.100.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	7	7	363.100.000,00	7	363.100.000,00	7	363.100.000,00	7	363.100.000,00	7	363.100.000,00	
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				1.477.679.000,00		1.477.679.000,00		1.477.679.000,00		1.477.679.000,00		1.777.679.000,00	
Terwujudnya Penataan organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan penataan organisasi	100	100	1.477.679.000,00	100	1.477.679.000,00	100	1.477.679.000,00	100	1.477.679.000,00	100	1.777.679.000,00	
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				405.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan	Jumlah Dokumen Pengelolaan	12	5	405.000.000,00	5	405.000.000,00	5	405.000.000,00	5	405.000.000,00	5	405.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Analisis Jabatan	Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)												
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				229.548.000,00		229.548.000,00		229.548.000,00		229.548.000,00		329.548.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2	1	229.548.000,00	1	229.548.000,00	1	229.548.000,00	1	229.548.000,00	1	329.548.000,00	
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				594.286.000,00		594.286.000,00		594.286.000,00		594.286.000,00		694.286.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	594.286.000,00	1	594.286.000,00	1	594.286.000,00	1	594.286.000,00	1	694.286.000,00	
4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				126.236.500,00		126.236.500,00		126.236.500,00		126.236.500,00		126.236.500,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1	1	126.236.500,00	1	126.236.500,00	1	126.236.500,00	1	126.236.500,00	1	126.236.500,00	
4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				122.608.500,00		122.608.500,00		122.608.500,00		122.608.500,00		222.608.500,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	1	1	122.608.500,00	1	122.608.500,00	1	122.608.500,00	1	122.608.500,00	1	222.608.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Daerah (Dokumen)												
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1.316.456.000,00		1.216.456.000,00		1.216.456.000,00		1.316.456.000,00		1.316.456.000,00	
Tertelaksananya Kegiatan Keptotokoleran, Komunikasi dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase layanan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	100	100	1.316.456.000,00	100	1.216.456.000,00	100	1.216.456.000,00	100	1.316.456.000,00	100	1.316.456.000,00	
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan				557.577.000,00		457.577.000,00		457.577.000,00		557.577.000,00		557.577.000,00	
Tertelaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	255	12	557.577.000,00	12	457.577.000,00	12	457.577.000,00	12	557.577.000,00	12	557.577.000,00	
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				234.565.000,00		234.565.000,00		234.565.000,00		234.565.000,00		234.565.000,00	
Tertelaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12	12	234.565.000,00	12	234.565.000,00	12	234.565.000,00	12	234.565.000,00	12	234.565.000,00	
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				524.314.000,00		524.314.000,00		524.314.000,00		524.314.000,00		524.314.000,00	
Tertelaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasi an Tugas Pimpinan (Laporan)	255	12	524.314.000,00	12	524.314.000,00	12	524.314.000,00	12	524.314.000,00	12	524.314.000,00	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				78.455.237.080,00		76.719.430.500,00		76.799.430.500,00		86.869.430.500,00		89.869.430.499,00	
Meningkatnya kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	100	100	78.455.237.080,00	100	76.719.430.500,00	100	76.799.430.500,00	100	86.869.430.500,00	100	89.869.430.499,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				76.969.976.080,00		75.184.169.500,00		75.254.169.500,00		85.249.169.500,00		88.249.169.499,00	
Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	4	10	76.969.976.080,00	10	76.969.976.080,00	10	76.969.976.080,00	10	76.969.976.080,00	10	76.969.976.080,00	
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				30.317.189.080,00		26.131.382.500,00		26.131.382.000,00		35.926.669.500,00		39.026.381.999,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	5	7	30.317.189.080,00	7	26.131.382.500,00	7	26.131.382.000,00	7	35.926.669.500,00	7	39.026.381.999,00	
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				500.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan	2	1	500.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	KB (Dokumen)												
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				46.152.787.000,00		46.152.787.000,00		48.222.787.500,00		48.322.500.000,00		48.222.787.500,00	
Tertindakannya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	2	46.152.787.000,00	2	46.152.787.000,00	2	48.222.787.500,00	2	48.322.500.000,00	2	48.222.787.500,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LPPD (Nilai)	3,005	3,072	560.261.000,00	3,087	560.261.000,00	3,0945	570.261.000,00	3,0982	570.261.000,00	3,1002	570.261.000,00	
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				419.744.000,00		419.744.000,00		419.744.000,00		419.744.000,00		419.744.000,00	
Terselenggaranya Administrasi Tata Pemerintahan dengan baik	Jumlah Dokumen administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan	4	5	419.744.000,00	5	419.744.000,00	5	419.744.000,00	5	419.744.000,00	5	419.744.000,00	
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				119.487.000,00		119.487.000,00		119.487.000,00		119.487.000,00		119.487.000,00	
Tertindakannya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		1	119.487.000,00	1	119.487.000,00	1	119.487.000,00	1	119.487.000,00	1	119.487.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(Dokumen)												
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				159.654.000,00		159.654.000,00		159.654.000,00		159.654.000,00		159.654.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	1	159.654.000,00	1	159.654.000,00	1	159.654.000,00	1	159.654.000,00	1	159.654.000,00	
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				140.603.000,00		140.603.000,00		140.603.000,00		140.603.000,00		140.603.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	3	3	140.603.000,00	3	140.603.000,00	3	140.603.000,00	3	140.603.000,00	3	140.603.000,00	
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				140.517.000,00		140.517.000,00		150.517.000,00		150.517.000,00		150.517.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang dihasilkan (PKS)	4	20	140.517.000,00	20	140.517.000,00	20	150.517.000,00	20	150.517.000,00	20	150.517.000,00	
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				90.086.000,00		90.086.000,00		100.086.000,00		100.086.000,00		100.086.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	20	20	90.086.000,00	20	90.086.000,00	20	100.086.000,00	20	100.086.000,00	20	100.086.000,00	
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				50.431.000,00		50.431.000,00		50.431.000,00		50.431.000,00		50.431.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4	10	50.431.000,00	10	50.431.000,00	10	50.431.000,00	10	50.431.000,00	10	50.431.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan dan terselesaikannya penanganan perkara dan permasalahan hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)	100	100	925.000.000,00	100	975.000.000,00	100	975.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.050.000.000,00	
	Persentase Perkara dan Permasalahan hukum yang selesai ditangani (%)	100	100				100				100		
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				925.000.000,00		975.000.000,00		975.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00	
Terselesaikannya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyelesaian Fasilitasi dan Koordinasi hukum yang dilaksanakan	100	100	925.000.000,00	100	975.000.000,00	100	975.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.050.000.000,00	
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00	
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	478	450	250.000.000,00	450	250.000.000,00	450	250.000.000,00	450	275.000.000,00	450	275.000.000,00	
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum				500.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	10	22	500.000.000,00	24	525.000.000,00	24	525.000.000,00	26	550.000.000,00	26	550.000.000,00	
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				175.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00	
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	465	450	175.000.000,00	450	200.000.000,00	450	200.000.000,00	450	225.000.000,00	450	225.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(Dokumen)												
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2.662.318.267,00		2.576.704.369,00		2.783.936.548,00		2.864.933.916,00		2.864.933.916,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	100	100	882.483.270,00	100	796.869.372,00	100	1.004.101.551,00	100	1.085.098.919,00	100	1.085.098.919,00	
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				662.648.235,00		555.843.470,00		733.657.964,00		774.435.357,00		774.435.357,00	
Terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Jumlah kebijakan Kegiatan perekonomian yang dihasilkan	4	6	662.648.235,00	6	555.843.470,00	6	733.657.964,00	6	774.435.357,00	6	774.435.357,00	
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				483.020.000,00		351.771.000,00		499.771.000,00		499.771.000,00		499.771.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2	2	483.020.000,00	2	351.771.000,00	2	499.771.000,00	2	499.771.000,00	2	499.771.000,00	
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				95.254.500,00		95.254.500,00		109.542.675,00		136.451.210,00		157.741.452,00	
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4	4	95.254.500,00	4	95.254.500,00	4	109.542.675,00	4	136.451.210,00	4	157.741.452,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				34.373.735,00		46.673.883,00		55.673.883,00		63.213.147,00		56.922.905,00	
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	2	2	34.373.735,00	2	46.673.883,00	2	55.673.883,00	2	63.213.147,00	2	56.922.905,00	
4.01.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)				50.000.000,00		62.144.087,00		68.670.406,00		75.000.000,00		60.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	62.144.087,00	12	68.670.406,00	12	75.000.000,00	12	60.000.000,00	
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				117.843.850,00		123.736.044,00		136.116.444,00		156.533.744,00		156.533.744,00	
Terlaksananya admininstrasi Pembangunan	Jumlah Kebijakan pelaksanaan admininstrasi pembangunan yang dihasilkan	4	4	117.843.850,00	4	123.736.044,00	4	136.116.444,00	4	156.533.744,00	4	156.533.744,00	
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				86.595.000,00		90.924.750,00		100.017.150,00		115.019.650,00		115.019.650,00	
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	12	12	86.595.000,00	12	90.924.750,00	12	100.017.150,00	12	115.019.650,00	12	115.019.650,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				31.248.850,00		32.811.294,00		36.099.294,00		41.514.094,00		41.514.094,00	
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12	12	31.248.850,00	12	32.811.294,00	12	36.099.294,00	12	41.514.094,00	12	41.514.094,00	
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				101.991.185,00		117.289.858,00		134.327.143,00		154.129.818,00		154.129.818,00	
Terlaksananya kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	Jumlah Kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	4	2	101.991.185,00	2	117.289.858,00	2	134.327.143,00	2	154.129.818,00	2	154.129.818,00	
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				46.159.135,00		53.083.000,00		63.699.600,00		76.439.520,00		76.439.520,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	2	2	46.159.135,00	2	53.083.000,00	2	63.699.600,00	2	76.439.520,00	2	76.439.520,00	
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				55.832.050,00		64.206.858,00		70.627.543,00		77.690.298,00		77.690.298,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	2	2	55.832.050,00	2	64.206.858,00	2	70.627.543,00	2	77.690.298,00	2	77.690.298,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	35,56	35,87	1.779.834.997,00	36,00	1.779.834.997,00	36,5	1.779.834.997,00	37,01	1.779.834.997,00	37,1	1.779.834.997,00	
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.779.834.997,00		1.779.834.997,00		1.779.834.997,00		1.779.834.997,00		1.779.834.997,00	
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan	100	100	1.779.834.997,00	100	1.779.834.997,00	100	1.779.834.997,00	100	1.779.834.997,00	100	1.779.834.997,00	
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				802.545.650,00		802.545.650,00		802.545.650,00		802.545.650,00		802.545.650,00	
Terkeolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	12	12	802.545.650,00	12	802.545.650,00	12	802.545.650,00	12	802.545.650,00	12	802.545.650,00	
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				757.312.547,00		757.312.547,00		757.312.547,00		757.312.547,00		757.312.547,00	
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	12	12	757.312.547,00	12	757.312.547,00	12	757.312.547,00	12	757.312.547,00	12	757.312.547,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				219.976.800,00		219.976.800,00		219.976.800,00		219.976.800,00		219.976.800,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	50	60	219.976.800,00	60	219.976.800,00	60	219.976.800,00	60	219.976.800,00	60	219.976.800,00	

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah mengemban beberapa program prioritas Pembangunan Daerah yaitu :

1. Memfasilitasi Pendirian Universitas/Sekolah Tinggi yaitu memfasilitasi pelaksanaan MOU/kerjasama dengan Universitas/Sekolah Tinggi;
2. Pemberian Beasiswa berupa Beasiswa untuk Mahasiswa D3,D4 dan S1, Beasiswa S2, Beasiswa S3, Beasiswa Mahasiswa Metalurgi dan Beasiswa Mahasiswa Vokasi;
3. Bantuan Sosial (Bantuan Duka Bagi Warga Tidak mampu);
4. Peningkatan Kesejahteraan Petugas keagamaan (Imam Masjid, Imam Desa dan Kelurahan, Pembina Tilawah, Pembian Tahfis, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Pinandita Hindu, Pandita, Guru Pasraman, Pendeta dan Pengantar);
5. Wisata Religi bagi Petugas Keagamaan (Umroh, Wisata Rohani dan Tirta Yatra;
6. Sertifikasi Rumah Ibadah dan Bangunan Keagamaan;
7. Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Belajar Keagamaan;
8. Mendorong Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Unit Unit Percontohan.

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	Memfasilitasi Pendirian Universitas/Sekolah Tinggi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Bagian Pemerintahan
			Sub Kegiatan Fasilitas kerjasama Dalam Negeri	
2	Beasiswa	Meningkatnya kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
3	Bantuan Sosial (Bantuan Duka Bagi Warga Tidak mampu)	Meningkatnya kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
4	Peningkatan Kesejahteraan Petugas keagamaan (Guru Megaji, Imam Masjid)	Meningkatnya kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
			Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	
5	Wisata Religi	Meningkatnya kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
			Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	
6	Sertifikasi Rumah Ibadah dan Bangunan Keagamaan	Meningkatnya kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
			Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	
7	Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Belajar Keagamaan	Meningkatnya kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
			Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual	
9	Mendorong Pelaksanaan RB melalui Unit Unit Percontohan	Terwujudnya Penataan organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan penataan Organisasi	Bagian Organisasi
			Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah diukur melalui dua tingkat indikator, yaitu *Indikator Kinerja Utama (IKU)* dan *Indikator Kinerja Kunci (IKK)*. Kedua indikator ini disusun untuk memastikan bahwa peran strategis Sekretariat Daerah sebagai koordinator, fasilitator, dan penyedia dukungan administratif terhadap kepala daerah dan seluruh perangkat daerah dapat dijalankan secara efektif dan akuntabel.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RENSTRA Sekretariat Daerah dengan dokumen RPJMD Tahun 2025 - 2029 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja Sekretariat Daerah harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2025 - 2030, Berikut *IKU*, *dan IKK* dapat dilihat pada *tabel 4.5 dan tabel 4.6* sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2025-2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Nilai	69,41	71	72,5	75,8	77,25	80	81,5	
2.	Indeks BerAKHLAK	Indeks	73,23	78,3	80	85,01	89,01	90,05	91,40	
3.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,96	97,98	98	98,25	98,5	98,75	99,00	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,32	87,03	87,24	88,02	89,9	90,05	90,25	
5.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	58,3	67,3	70,15	73,12	77,71	80,15	81,75	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Persentase jumlah total Proyek Konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditanda tangani pada kuartal pertama.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak terdapat proyek dengan nilai diatas 50 Miliar yang ditandatangani pada kuartal pertama Tahun berjalan
2.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	63,67	63,88	64,10	64,31	64,52	64,73	64,94	
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	67,48	67,48	68,11	68,75	69,39	70,04	70,69	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu timur Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai -penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029. Renstra Sekretariat Daerah merupakan pedoman bagi seluruh Unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan ketentuan paradigma baru.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan daerah oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2025 – 2029

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 harus mengikuti kaidah-kaidah yang teratur dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya, seperti RPJMN dan RPJPD serta RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Untuk memastikan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) hingga Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum.
2. Renstra harus mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang sedang berjalan dan RPJMD. Hal ini memastikan bahwa Renstra selaras dengan arah pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan RPJPN dan RPJMN serta RPJMD.
3. Renstra harus disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing SKPD. Ini berarti Renstra Sekretariat Daerah harus mencerminkan fokus dan tanggung jawab SKPD dalam melaksanakan pembangunan Daerah.
4. Penyusunan Renstra harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 (dua) Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
5. Penyusunan Renstra harus mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi lokal, dan kearifan lokal. Ini berarti Renstra harus mencerminkan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat, serta memanfaatkan potensi dan kekayaan lokal untuk mencapai tujuan Pembangunan.
6. Renstra harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, serta untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Renstra.

5.3 Pengendalian Evaluasi

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan daerah yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan untuk mengetahui sejauh mana capaian dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka Kepala Daerah bersama Bapelitbanda wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Madi, September 2025
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BAHRI SULI, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19660620 198603 1 007

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik		Nilai SAKIP Daerah	NILAI	Hasil Evaluasi KEMENPAN RB	67,77	70,01	70,42	71,82	73,30	74,50	76,10
1.1		Meningkatnya KualitasTata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Hukum	INDEKS	Hasil Evaluasi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	97,96	97,98	98,00	98,25	98,50	98,75	99,00
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	NILAI	Hasil Evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	69,41	71,00	72,50	75,80	77,25	80,00	81,50
1.2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks BerAKHLAK	INDEKS	Hasil Evaluasi KEMENPAN RB	73,23	78,30	80,00	85,01	89,01	90,05	91,40
			Indeks Kepuasan Masyarakat	NILAI	Hasil Evaluasi KEMENPAN RB	86,32	87,03	87,24	88,02	89,90	90,05	90,25
			Nilai AKIP Sekretariat Daerah	NILAI	Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	58,30	67,30	70,15	73,12	77,71	80,15	81,75